

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

(Studi Kasus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Prodi Ilmu Politik



Oleh:

Rezka Nur Satyo

1906016062

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UIN WALISONGO SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp: 5 (lima) Eksemplar

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Rezka Nur Satyo

NIM : 1906016062

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus: DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019).

Dengan ini setelah saya setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Januari 2023

Pembimbing



Rofiq, M.Si

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
(Studi Kasus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019)**

Disusun Oleh:

Rezka Nur Satyo

1906016062

Telah dipertahankan didepan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 23 Februari 2023 dan telah dinyatakan lulus.

Ketua



Moh. Khasan, M.Ag

NIP. 197412122003121004

Sekretaris



Dr. Rofiq, M.Si

NIP. 197303052016011901

Penguji I



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A.

NIP. 196805051995031002

Penguji II



Tika Ifrida Takayasa, M.A.

NIP. 198811152019032018

Pembimbing



Dr. Rofiq, M.Si

NIP. 197303052016011901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Rezka Nur Satyo menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Analisis Pengelolaan Keuangan Partai Politik Studi Kasus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019*” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya dari pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 8 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Rezka Nur Satyo
NIM. 1906016062

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikn rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Keuangan Partai Politik Studi Kasus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah*”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah dan berpengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran di bangku perkuliahan ini dan dalam proses penyusunan skripsi, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum yang telah memberikan berbagai ilmu selama penulis menuntut pendidikan di jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Drs. Nur Syamsudin, M.A yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis didalam perkuliahan.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Muhammad Mahsun, M.A yang telah memberikan berbagai ilmu dan dukungan pada penulis dalam hal perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Rofiq, M.Si yang telah membimbing, mendukung, memotivasi, dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini dengan lancar.

6. Segenap jajaran Bapak/Ibu dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan pada penyusunan skripsi ini.
7. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala urusan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
8. Rinto Subekti selaku Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah yang telah mengizinkan dan menginformasikan penulis untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.
9. Segenap para pengurus DPD Partai Demokrat yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi dalam wawancara, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
10. Kedua orang tua penulis Toha Yusuf Prayitno dan Karsiti, dan saudari kandung penulis Atika Fitri Asih yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua dan saudari penulis selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
11. Sahabat penulis sebagai wadah cerita, semangat, dan motivasi penulis dalam segala hal, Selly Sekarharum Putri. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam hidup dan mampu meraih segala sesuatu yang diinginkan.
12. Sahabat penulis sebagai alat motivasi dalam kehidupan, Widi Yulianto. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam hidup dan mampu meraih cita-cita yang didambakan.
13. Sahabat sekaligus rekan kos penulis yang telah berjuang bersama dan memberikan dukungan, Farishi Aditya Sandi. Semoga dilain kesempatan dapat bertemu kembali dan dapat meraih kesuksesan yang dicita-citakan.
14. Rekan-rekan Ilmu Politik B dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik angkatan 2019 yang telah memberikan kesempatan untuk belajar, berbagi kebahagiaan, dan semangat bagi penulis. Semoga dilain kesempatan kita dapat kembali bertemu dan meraih kesuksesan masing-masing.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini,

penulis sampaikan terima kasih. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan sangat berarti bagi penulis agar skripsi ini memperoleh peningkatan kualitas dan dapat berguna bagi pembaca. Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Semarang, 8 Januari 2023

Penulis



Rezka Nur Satyo

NIM. 1906016062

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Toha Yusuf Prayitno dan Ibu Karsiti yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal yang selalu memanjatkan untaian do'a tulus disetiap langkah kaki saya tanpa lelah demi keselamatan dan kesuksesan saya.

MOTTO

“Ketakutan pada kegagalan dalam proses melangkah adalah suatu tindak penghinaan kepada Tuhan”

“Mantaplah dengan yang kamu lakukan, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membahagiakanmu, Tuhan akan menjauhkanmu dari yang menyedihkanmu. Percaya itu”

(Cak Nun)

ABSTRAK

Pada setiap partai politik di Indonesia pasti memiliki keuangan guna menyokong kegiatan-kegiatan kepartaian, baik kegiatan atas dasar kepentingan partai ataupun kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 Pasal 34 Ayat 1 menegaskan bahwasanya sumber keuangan partai politik diperoleh melalui iuran anggota, sumbangan dibawah ketetapan hukum, serta dana bantuan yang diberikan pemerintah dengan APBD atau APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mengelola keuangan partai dan bagaimana sikap pengurus dalam menghadapi kendala yang dimiliki.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, studi ini menggunakan teori Value For Money (VFM) Audit dengan menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh di lapangan serta dibantu metode penelitian kualitatif yang mengedepankan prosedur penelitian dengan menyajikan data deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mampu mengelola keuangan partai untuk memenuhi segala kebutuhan partai dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik dengan menerapkan prinsip dari teori VFM Audit ditengah kendala kekurangan keuangan yang dihadapi. Namun, pengelolaan keuangan partai untuk pendidikan politik tidak efektif sebab pendidikan politik hanya fokus bagi anggota partai sehingga pendidikan politik bagi masyarakat masih minim. Selain itu, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah tidak memiliki sikap ekonomis, sebab tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan tidak menerapkan iuran anggota partai sebagai sumber daya yang mampu dimanfaatkan untuk sumber keuangan ditengah kendala keuangan yang dimiliki.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan, Partai Politik

ABSTRACT

Every political party in Indonesia must have finances to support party activities, both activities based on party interests or activities aimed at providing benefits to the community. Based on Law No. 2 of 2011 Article 34 Paragraph 1 confirms that the financial resources of political parties are obtained through member fees, donations under legal provisions, as well as assistance funds provided by the government with the APBD or APBN. This study aims to find out how the Central Java Democratic Party DPD manages party finances and how the attitude of the board is in dealing with the obstacles they have.

To answer the research questions above, this study uses the theory of Value For Money (VFM) Audit by describing phenomena from data obtained in the field and assisted by qualitative research methods that prioritize research procedures by presenting descriptive data. The type of approach used is a case study approach. Data collection in this study used semi-structured interviews and documentation methods.

The results of this study indicate that the Central Java Democratic Party DPD is able to manage party finances to meet all party needs and carry out political education activities by applying the principles of VFM Audit theory amidst the constraints of financial shortages faced. However, the management of party finances for political education is ineffective because political education is only focused on party members so that political education for the community is still minimal. In addition, the Central Java Democratic Party DPD does not have an economic attitude, because it is unable to utilize available resources by not applying party member fees as a resource that can be utilized for financial resources amid its financial constraints.

Keywords: Management, Finance, Political Parties

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. TINJAUAN PUSTAKA	5
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
2. Sumber dan Jenis Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisis Data.....	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
KERANGKA TEORI	12
A. TEORI VALUE FOR MONEY.....	12
B. PENJELASAN KONSEPTUAL.....	13
1. Pengelolaan.....	13
2. Fungsi Pengelolaan (Manajemen).....	14
3. Anggaran.....	15

4. Pengertian Partai Politik.....	16
5. Fungsi Partai Politik.....	16
6. Manajemen Organisasi Partai Politik.....	18
BAB III.....	22
PROFIL DPD PARTAI DEMOKRAT JAWA TENGAH.....	22
A. Sejarah Partai Demokrat	22
B. Struktur Organisasi Partai Demokrat	24
C. Ideologi Partai Demokrat.....	29
D. Struktur Organisasi DPD Partai Demokrat Jawa Tengah	30
E. Pengelolaan Keuangan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.....	34
BAB IV.....	37
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA PARTAI DEMOKRAT JAWA TENGAH	37
A. Pengelolaan Pendapatan Keuangan DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah	38
B. Penetapan Rencana Pembelanjaan Partai.....	44
C. Penyusunan Dan Keterbukaan Laporan Keuangan di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.....	49
D. Kebijakan Pelanggaran Serta Penerapan Sanksi Kebijakan.....	58
BAB V	62
ANALISA TERKAIT KENDALA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DI DPD PARTAI DEMOKRAT JAWA TENGAH.....	62
A. Kendala Dalam Mengelola Keuangan Partai	62
B. Sikap Pengurus DPD Partai Demokrat Dalam Menyelesaikan Permasalahan Dalam Pengelolaan Keuangan	66
BAB VI.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Struktur Organisasi DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.....	30
Grafik 2 Mekanisme Pengelolaan Keuangan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.....	37
Grafik 3 Contoh RAB Umum DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.....	44
Grafik 4 Sistematisa Pengajuan Data Sumbangan Kegiatan Kepada Pengurus atau Anggota Fraksi.....	46
Grafik 5 Contoh Laporan Keuangan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.....	49
Grafik 6 Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan.....	54
Grafik 7 Mekanisme Laporan Dana Kampanye.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Partai Demokrat.....	24
Gambar 2 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah.....	41
Gambar 3 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah.....	42
Gambar 4 Contoh Bukti Transaksi Penggunaan Keuangan Sebagai Lampiran Dalam Laporan Keuangan.....	51
Gambar 5 Laporan Pengawasan LADK Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah.....	56
Gambar 6 Laporan Pengawasan LPPDK Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah.....	57
Gambar 7 Surat Izin Penelitian.....	75
Gambar 8 Surat Izin Penelitian.....	76
Gambar 9 Surat Izin Penelitian.....	77
Gambar 10 Surat Permohonan Informasi Kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.....	78
Gambar 11 Dokumentasi Wawancara Langsung Dengan Direktur Eksekutif Sekaligus Ketua Melalui Sambungan Telpon.....	79
Gambar 12 Dokumentasi Wawancara Bersama Bendahara.....	80
Gambar 13 Dokumentasi Wawancara Dengan Wakil Direktur Eksekutif Bagian Keuangan.....	81
Gambar 14 Dokumentasi Wawancara Dengan Staff Kantor.....	82
Gambar 15 Dokumentasi Laporan Keuangan Dana Bantuan Politik Tahun 2021.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran menjadi faktor signifikan pada penyelenggaraan disuatu lembaga, organisasi, maupun pemerintahan. Anggaran akan dirancang untuk perkiraan terkait hal apapun yang akan terjadi pada masa satu periode, namun anggaran bukan sebuah prediksi akan tetapi anggaran merupakan suatu perkiraan mengenai apa saja yang bisa terjadi pada segala situasi maupun kondisi. Anggaran menjadi sangat diperlukan dalam suatu negara agar mampu merancang pengawasan, perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan sebagai pedoman kerja pada satu periode. Pendapat Munandar (2015), anggaran merupakan sebuah *planning* dengan penyusunan sistematis yang terdiri dari semua aktivitas lembaga yang dijelaskan dalam suatu moneter dan berlaku dalam satu periode kedepan. Anggaran dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintah pada suatu periode, nantinya pendapatan dari anggaran akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan, program, dan keperluan didalam proses pelaksanaanya (Munandar, 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwasanya anggaran dikatakan tepat yaitu anggaran yang pengelolaannya tertib serta taat pada aturan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab, transparan dan berkeadilan. Dari hal tersebut, suatu yang dinilai paling penting yaitu efektif dalam mengelola anggaran. Pengelolaan anggaran dengan dasar kinerja yang terdapat sikap pada surplus dan defisit, artinya pada pengelolaan anggaran terdapat kesesuaian pada tujuan bekerja dengan target yang sudah ditentukan dan jika target tidak memiliki kesesuaian dengan realita maka anggaran tersebut dikatakan mengalami surplus.

Anggaran negara akan digunakan untuk keperluan berbagai lembaga pemerintahan guna merealisasikan segala program yang telah dirancang oleh masing-masing instansi pemerintahan. Partai politik termasuk lembaga atau organisasi yang memiliki hak dalam penggunaan anggaran tersebut, anggaran akan digelontorkan dengan tujuan parpol mampu melaksanakan sosialisasi dan komunikasi politik.

Pada negara demokrasi, partai politik merupakan aspek utama guna menjadi jembatan politik bagi masyarakat yang resmi guna menuju serta mendapatkan kendali atas suprastruktur politik negara. Keberadaan partai politik dengan jabatan politik yang awalnya merupakan suatu keistimewaan untuk suatu kelompok sosial, menjadi dapat diakses bagi seluruh masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial.

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwasanya Partai Politik merupakan organisasi bersifat nasional serta didirikan suatu kelompok masyarakat diatas persamaan hak serta tujuan dalam berjuang dalam kepentingan politik para anggota, bangsa dan negara. Selain itu mengupayakan NKRI tetap utuh dan bersatu berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. Peran serta fungsi dari partai politik menurut Firmanzah (dalam Yoyoh dan Efriza, 2015:362) terbagi dalam dua aspek. Yang pertama adalah peran serta tugas internal dari organisasi, partai politik menjalankan perannya yang berpengaruh dalam pembekalan, pembinaan, kaderisasi, edukasi dan mempertahankan ideology politiknya sebagai latar belakang dari berdirinya parpol tersebut. Yang kedua adalah partai politik bersifat eksternal, dimana peran serta fungsinya memiliki keterkaitan dengan bangsa maupun juga negara. Adanya partai politik juga terdapat pertanggungjawaban secara moral, etika dan konstitusional dalam keadaan serta suasana pada kehidupan bangsa yang lebih baik.

Dalam menjalankan fungsi serta kegiatannya, partai politik sangat membutuhkan anggaran untuk menyokong upaya yang dimiliki oleh partai politik. Sehingga negara membantu dalam hal keuangan bagi partai politik agar mampu memenuhi keterlaksanaan kegiatan pada parpol. Hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 yang menegaskan bahwasanya sumber didalam keuangan parpol diperoleh berdasarkan iuran anggota, melalui sumbangan dibawah ketetapan hukum, serta melalui dana bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan bantuan tersebut supaya berperan sebagai penyokong berbagai kegiatan parpol dalam melaksanakan pendidikan politik serta operasional sekretariat. Pendidikan politik sebagai sarana untuk seluruh anggota serta masyarakat supaya mampu menjadi warga negara Indonesia dengan memiliki kesadaran hak maupun kewajibannya. Sebagai penyokong kegiatan dari partai

politik merupakan tujuan penyaluran bantuan dana terhadap partai politik. Penyaluran dana bantuan parpol tersebut dilaksanakan setiap tahun, guna menyokong mobilitas pada setiap kegiatan yang memperjuangkan tujuan para anggota pada kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu pendidikan politik serta operasional sekretariat seperti yang tertanam dalam Pergub Jawa Tengah No. 40 Tahun 2019 Pasal 10.

Partai Demokrat merupakan partai yang ada di Indonesia, berdiri dan secara resmi telah didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sejak 10 September 2001 (Laman resmi Partai Demokrat). Partai Demokrat memperoleh 954.351 suara dari 13 Dapil di Provinsi Jawa Tengah (KPU Provinsi Jawa Tengah, 2019). Dengan perolehan suara sebesar tersebut, berdasarkan Pergub Jawa Tengah No 40 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah pada Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi “Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per suara sah” maka DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.1.145.101.200 per tahun dari APBD Jawa Tengah (KPU Provinsi Jawa Tengah, 2019).

Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Parpol menjadi salah satu sumber keuangan yang menjadi andalan parpol untuk bergantung. Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan politik dan operasional sekretariat dari dana yang bersumber dari APBD tersebut, namun pada kenyataannya dana yang disalurkan oleh pemerintah belum cukup membantu dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan politik atau operasional sekretariat bagi sebagian parpol seperti yang terjadi pada DPD Partai Demokrat Jawa Tengah. Selain itu, iuran dari anggota fraksi juga menjadi andalan untuk bergantung bagi partai politik, namun Partai Demokrat tidak bisa mendapatkan dana dengan jumlah besar seperti yang diperoleh oleh partai besar yang lain. Mengingat untuk periode 2019-2024 anggota fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dari Partai Demokrat hanya berjumlah lima anggota (Sih Winantu, 2022).

DPD Partai Demokrat Jawa Tengah memiliki kebijakan sendiri dalam mengatur jumlah besaran minimal untuk iuran bagi anggota fraksi DPRD Provinsi, selain itu juga minimal besaran bagi ketua fraksi dan anggota fraksi memiliki perbedaan. Iuran itu rutin dilakukan setiap satu tahun. Selain iuran rutin, anggota fraksi juga kerap memberikan sumbangan untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah (Melly, 2022). Namun, di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah ini tidak melaksanakan iuran rutin bagi anggota partai. Sehingga sumber keuangannya hanya mengandalkan dari dana bantuan politik dan iuran fraksi saja. Padahal dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2019 Pasal 99 ayat 1, telah diatur bahwa sumber keuangan partai termasuk dari iuran anggota. Selain itu, tidak adanya sumbangan dari pihak luar juga membuat Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah kerap merasakan kurangnya anggaran untuk melaksanakan program kegiatan yang ditetapkan (Winantu, 2022).

Berdasarkan dari latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji “**Analisis Pengelolaan Keuangan Partai di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019**”. Dengan alasan bahwa DPD Partai Demokrat Jawa Tengah sering mengalami kekurangan dalam keuangan yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan serta programnya. Selain itu juga, peneliti menganggap penelitian ini menarik untuk dianalisis tentang bagaimana partai politik mengelola keuangan serta sumber keuangan yang terdapat berdasarkan Undang-Undang atau AD/ART yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, terciptanya pertanyaan didalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan partai politik pada partai Demokrat Jawa Tengah pada periode 2019?
2. Bagaimana Partai Demokrat Jawa Tengah menghadapi kendala dalam mengelola keuangan partai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka itu tujuan yang terdapat dan diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan keuangan partai politik pada DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui serta memahami apa kendala yang dialami DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam mengelola keuangan partai politik yang didapatkan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki harapan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan berupa pengetahuan wawasan ilmu sebagai suatu sumber rujukan atau referensi terhadap kepentingan keilmuan dalam mempelajari permasalahan yang serupa dikemudian hari.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam hal menambah pengetahuan wawasan terhadap penulis maupun masyarakat dalam memahami pengelolaan keuangan oleh partai politik.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut merupakan beberapa tinjauan pustaka pada penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian dengan penulis Yuli Handayani yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung. Didalam penelitian ini, metode deskriptif asosiatif digunakan penulis untuk penyelesaiannya. Didalam penelitian ini memiliki jumlah 54 orang populasi sebagai bagian partai politik dan rumus Slovin digunakan dalam penentuan sample. Hasil didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dari 9 partai politik yang ada di Kota Bandung, dengan parsial transparansi memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 61,4% kepada pengelolaan keuangan parpol serta akuntabilitas juga memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 77,4% pada keuangan partai politik. berdasarkan hasil uji F berpengaruh serta signifikan kepada pengelolaan keuangan parpol (Y), nilai signifikan 0,000 serta nilai F terhitung sebesar 55,591 maka lebih besar dari F tabel 2,448. Maka, transparan serta akuntabilitas pada parpol memiliki pengaruh yang cukup kuat pada pengelolaan keuangan partai politik.

Kedua, penelitian ini dilakukan Sekar Anggun Gading Pinilih yang berjudul Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. Dalam

penelitian kali ini menggunakan penelitian kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggalangan dana pada parpol tidak berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka dari itu menciptakan beragam kasus dugaan korupsi yang diperbuat oleh anggota parpol itu sendiri. Berdasarkan dari kasus korupsi yang telah diungkap mampu memperlihatkan suatu realita bahwa dana yang dikorupsi tersebut digunakan dalam mendorong kepentingan terhadap pemenangan pemilu, ditingkat nasional ataupun dalam tingkat lokal yang menyebabkan buruknya kualitas demokrasi di Indonesia. Prinsip pada transparansi serta akuntabilitas keuangan partai politik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan menanamkan sifat wajib pada seluruh parpol menyusun laporan mengenai keuangan berdasarkan sumber yang telah diterima oleh parpol tersebut. Selain itu juga perlunya penyusunan laporan keuangan pemilu termasuk dana kampanye, sehingga akan terjadi keseragaman pemahaman antar partai politik.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Yusuf Eko Nahuddin dengan judul Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kajian kepustakaan. Hasil diperoleh di penelitian ini mengungkap bahwa atas dasar analisis terkait dengan tanggung jawab pada dana partai politik yang berdasarkan prinsip transparansi maupun akuntabilitas, serta ikhtiar parpol didalam upayanya menciptakan pengelolaan keuangan parpol menuju pengelolaan pemerintahan menjadi baik. Didalam hubungannya, keuangan partai politik harus dipertanggung jawabkan unruk menciptakan partai politik yang transparan serta akuntabel dalam mengelolanya. Partai politik harus menyusun serta menyerahkan laporan pertanggung jawaban penerimaan serta pengeluaran berdasarkan sumber iuran anggota, sumber keuangan sah lainnya berdasarkan kebijakan. Selain itu, secara berkala pelaporan pada dana APBN/APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan selama satu tahun agar mampu dicek serta diaudit maksimal satu bulan sesudah tahun anggaran tersebut selesai.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Wyga Westhy Yolanda Lumban Gaol tentang Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN Dan/Atau APBD. Peneliti menggunakan metode hukum lebih jelasnya ialah hukum normative pada penelitian ini. Penelitian ini menganalisa terkait pengaturan hukum dalam

pengelolaan keuangan parpol berdasarkan uang yang bersumber dari APBD/APBN. Pengaturan pengelolaan dana bantuan parpol yang berdasarkan pada Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Peraturan yang dijabarkan diatas terdiri dari aturan dalam sumber pada keuangan partai politik, sistematika pengajuan maupun pemberian bantuan keuangan parpol, cara dalam menetapkan besarnya jumlah bantuan keuangan, juga aturan dalam penggunaan bantuan dana parpol. Maka, bagi semua partai politik diwajibkan untuk memberikan laporan atas pertanggungjawaban penggunaan keuangannya guna membuktikan ada atau tidaknya penerapan prinsip akuntabilitas maupun transparansi.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Rattu Nadra Syakila yang berjudul Implementasi Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian disini mempergunakan metode yaitu penelitian kualitatif. Didalam penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan adanya suatu permasalahan yaitu terlambatnya pengumpulan berkas yang pada dasarnya wajib dilaksanakan oleh partai politik serta bagi parpol yang ditemukan tidak melakukan penyerahan laporan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sumatera Selatan, dengan begitu membuat dana bantuan untuk parpol tersebut tidak dapat diproses untuk dilaksanakannya penyaluran. Maka, perlu peningkatan Sumber Daya Manusia dan proses pengumpulan berkas melalui suatu sistem yang dapat diakses secara online untuk mengurangi permasalahan yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendalami persoalan subjek penelitian (Moleong, 2005). Pada penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif baik dengan lisan, pendapat, serta literature yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang proses pengelolaan keuangan dalam partai politik khususnya partai demokrat sebagai partai yang kurang dilirik maupun digemari oleh masyarakat dibandingkan dengan partai besar lainnya di Jawa Tengah.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dirasa tepat ketika penelitian tersebut bertujuan untuk mencari informasi yang mendalam agar dapat menghasilkan informasi yang komprehensif terkait pembahasan penelitian. Pendekatan pada penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan peristiwa atau kejadian yang memiliki keunikan, baik sederhana maupun kompleks (Rahardjo, 2017). Studi kasus pada penelitian ini ialah DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

2. Sumber dan Jenis Data

Didalam penelitian ini mempergunakan data yang bersifat primer serta yang bersifat sekunder, antara lain seperti dibawah ini:

1) Data primer

Menurut Sugiyono (2018), data primer ialah sumber data dengan dihasilkan dengan cara langsung oleh peneliti dan tanpa perantara, sehingga menggunakan data mentah. Didalam penelitian ini, data didapatkan dengan wawancara yang dilaksanakan bersama tokoh-tokoh DPD partai Demokrat Jawa Tengah.

2) Data sekunder

Sugiyono (2018) berpendapat bahwasanya data sekunder ialah sumber data dengan secara tidak langsung untuk menyajikan data terhadap pengumpul data seperti dengan perantara pihak yang lainnya ataupun dengan dokumen. Didalam penelitian ini, sumber dari data yang digunakan antara lain yaitu jurnal, artikel online, buku, serta laporan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian.

Adapun untuk pedoman dalam penulisan proposal skripsi ini, peneliti mengacu kepada Buku Panduan Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian disini memanfaatkan teknik untuk pengumpulan data seperti dibawah ini:

1) Wawancara.

Wawancara ialah kejadian atau sesuatu prosedur interaksi antara penanya dan narasumber melalui komunikasi secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti (Yusuf, 2014). Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan semi terstruktur.

Wawancara yang semi terstruktur memanfaatkan pedoman wawancara dan pertanyaan informal dapat ditanyakan oleh pewawancara dengan cara berbeda.

2) Studi Dokumen dan Literatur

Dokumentasi merupakan sumber data terkait catatan peristiwa yang digunakan untuk melengkapi penelitian berbentuk tertulis, ataupun karya-karya monumental yang menyajikan informasi untuk proses penelitian yang dilakukan (Nilamsari, 2014). Kegiatan dokumentasi bertujuan untuk menambah informasi yang ada dalam bentuk surat, arsip, laporan, maupun jurnal kegiatan yang dihasilkan pada saat observasi lapangan. Hal ini dapat melengkapi dan menguatkan penemuan yang ada dilapangan sebagai bukti kebenaran dan keabsahan data.

4. Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik dalam penelitian disini memiliki acuan kepada teknik analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011). Proses analisis pada data kualitatif akan dilaksanakan berdasarkan tiga tahap, seperti dibawah ini:

1) Reduksi data

Reduksi data ialah tahapan menyebarluaskan data sehingga data dapat searah berdasarkan kebutuhan serta tidak sulit dalam meraih informasi. Data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan wawancara ataupun dokumen dikelompokkan dari data sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Peneliti dapat membuang data tidak atau kurang memiliki kepentingan dalam penelitian, sehingga data tersebut akan menjadi sejalan dengan kebutuhan peneliti untuk di proses ke tahap yang selanjutnya.

2) Penyajian data

Tahap ini peneliti akan mengutarakan data yang telah direduksi dengan penyajian data naratif. Selanjutnya kumpulan data tersebut berisikan informasi jelas sehingga pembaca mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Penyajian data ini ditampilkan secara terstruktur yang menjadikan data ini tidak berupa data yang mentah lagi, akan tetapi telah menjadi suatu kumpulan informasi. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilaksanakan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

flowchart, dan sejenis lainnya. Namun, rata-rata mempergunakan teks berdasarkan sifat naratif.

3) Penarikan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan mampu menjadikan informasi yang diberikan didalam laporan penelitian sekaligus sebagai penutup. Penarikan kesimpulan dapat direalisasikan apabila seluruh perolehan data yang didapatkan menjadi variatif mampu disederhanakan, disusun atau diperlihatkan dengan penggunaan media tertentu, dan kemudian bisa dipahami serta diresapi secara mudah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk pembaca dapat mudah dalam memahami isi dari skripsi serta dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, skripsi ini terbagi dalam enam (6) Bab, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, teknik analisis data, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

Didalam bab ini memuat teori Value For Money yang dipergunakan sebagai landasan analisis data secara detail dan mendalam tentang bagaimana teori Value For Money memiliki signifikansi dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan diambil.

BAB III

PROFIL PARTAI DEMOKRAT

Dalam bab ini memuat terkait informasi umum mengenai objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Gambaran umum tersebut meliputi: Sejarah Partai Demokrat, Struktur Organisasi, Ideologi Partai Demokrat.

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA PARTAI DEMOKRAT JAWA TENGAH

Dalam bab ini akan menjelaskan secara mendalam dan komprehensif terkait partai demokrat dalam mengelola keuangan yang dimiliki oleh partai dalam mengelola pendapatan, penetapan rencana pembelanjaan partai, penyusunan serta keterbukaan laporan keuangan, dan menetapkan kebijakan pelanggaran serta menerapkan sanksi kebijakan.

BAB V

ANALISA TERKAIT KENDALA APA SAJA YANG DIALAMI PARTAI DEMOKRAT JAWA TENGAH DALAM MENGELOLA KEUANGAN PARTAI

Dalam bab ini dijelaskan analisis terhadap kendala apa saja yang dimiliki oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam mengelola keuangan partai yang berasal dari berbagai sumber dan sikap DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam melakukan penyelesaian terkait kendala atau masalah yang dimiliki.

BAB VI

PENUTUP

Didalam bab ini memiliki isi terkait kesimpulan setelah penelitian dilakukan oleh penulis dan juga terdapat saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Value For Money

Pada pelaksanaan pertanggungjawaban publik oleh lembaga pemerintahan, perlu adanya perluasan pemeriksaan dalam pelaksanaannya. Pemeriksaan *Value For Money* (VFM) Audit, lingkup pengecekan yang terdiri dari audit keuangan, kepatuhan, serta kinerja. Selain itu, *Performance audit* atau audit kinerja terdiri atas audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengertian lain bagi *performance audit* adalah VFM Audit atau biasa disingkat 3E's audit yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas audit (Mardiasmo, 2018).

Pengertian audit kinerja menurut Malan (dalam Mardiasmo, 2018) merupakan prosedur yang sistematis guna mendapatkan serta mengevaluasi bukti dengan objektif, sehingga bisa dilakukan penilaian yang independen terhadap keekonomisan serta efisiensi operasi, efektivitas didalam memperoleh hasil sesuai diharapkan juga patuh terhadap kebijakan, aturan hukum, memilih atas keselarasan terhadap kinerja sudah diraih dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan juga melakukan komunikasi pada hasil tersebut terhadap pihak yang menggunakan laporan tersebut. Audit kinerja memiliki fokus dalam pengecekan terhadap segala tindakan serta peristiwa ekonomi dengan memperlihatkan suatu kinerja entitas ataupun fungsi yang sudah diaudit.

Kinerja pada suatu organisasi atau lembaga dapat dikatakan baik jika organisasi tersebut dapat memenuhi segala tugasnya sebagai usaha dengan dilakukan untuk menggapai suatu target yang sudah ditetapkan didalam standar tinggi dengan biaya rendah. Berdasarkan ketentuan sistem, kinerja dapat dikatakan bagus pada organisasi didapatkan jika dalam administrasi serta penyediaan jasa bagi organisasi atau lembaga tersebut dilaksanakan dalam tingkatan yang ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2018).

Menurut Mardiasmo (2018), konsep ekonomi, efisien, dan efektif adalah seperti dibawah ini:

- a. Ekonomi, yaitu biaya *input* yang diterapkan didalam operasional organisasi dipastikan mampu diraih dengan sumber daya yang tersedia.

- b. Efisien, artinya *output* yang sudah maksimal bisa didapatkan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang ada.
- c. Efektif, artinya ketersediaan ataupun hasil atas jasa dalam suatu organisasi mampu memberikan pelayanan dalam hal kebutuhan pengguna jasa secara tepat.

Didalam VFM Audit, hasil dari audit bukan hanya memberikan kesempatan atas dasar tahapan audit yang sudah dilakukan. Namun, VFM Audit pun dapat dilengkapi dengan adanya rekomendasi guna memperbaiki pada satu masa atau periode yang akan datang (Mardiasmo, 2018). Penerapan konsep VFM Audit didalam pengukuran atau penilaian kinerja organisasi tentunya mampu membawa dampak positif terhadap organisasi itu sendiri ataupun pada masyarakat. Dari dampak positif yang telah dikehendaki pada penerapan VFM Audit pada organisasi yaitu ekonomis (hemat cermat) pada peng-adaan serta juga alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) didalam pemanfaatan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) didalam menggapai target maupun sasaran (Mardiasmo, 2009).

B. Penjelasan Konseptual

1. Pengelolaan

Pengelolaan dapat diartikan sama dengan manajemen, yang artinya merupakan pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang intinya merupakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (M. Rohman dan Sofan Amri, 2012:273). Menurut Harsoyo (dalam Jamal Ma'mur Asmani, 2012: 222) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan.

Menurut Andrew F. Sikula (dalam Malayu S. P. Hasibuan, 2003:2), manajemen merupakan:

“Manajemen is general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decisions making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.”

Dapat disimpulkan pernyataan tersebut bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin serta pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik, dan informasi terkait sumber daya guna mencapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif.

Berdasarkan definisi pengelolaan menurut beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan atau usaha melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan sendiri merupakan suatu proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan. Pengorganisasian merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun, pengarahan diperlukan guna menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan diawasi secara dekat. Dengan evaluasi, akan dapat menjadi proses pengawasan aktivitas, untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan (Manajemen)

Fungsi manajemen menurut Ismail Solihin (2009:5) adalah:

1. *Planning* (perencanaan), adalah suatu proses pengembangan tujuan-tujuan organisasi serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam perencanaan ini mencakup penetapan tujuan, pengembangan berbagai premis terkait lingkungan organisasi yang dimana tujuan organisasi akan dicapai, memilih arah tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. *Organizing* (pengorganisasian), yaitu suatu proses dimana karyawan dan pekerjaannya saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian mencakup pembagian kerja diantara kelompok dan individu serta pengkoordinasian aktivitas individu dan kelompok. Namun tidak hanya mengorganisasikan sumber daya manusia, akan tetapi juga dapat

mengorganisasikan penggunaan sumber daya non manusia seperti uang, material, ataupun peralatan.

3. *Staffing* (pengisian staff), yaitu proses untuk memastikan bahwa karyawan yang berkompeten agar dapat dipilih, dikembangkan, dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan organisasi.
4. *Leading* (memimpin), adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktivitas hubungan kerja agar mereka dapat bekerja dengan sukarela dan harmonis dalam mencapai tujuan organisasi.
5. *Controlling* (pengendalian), merupakan suatu proses untuk memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian mencakup menetapkan berbagai tujuan dan standar, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan tujuan serta standar yang ditentukan, dan mendorong keberhasilan dan mengoreksi berbagai kelemahan.

3. Anggaran

Menurut Munandar (2015), anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang. Anggaran dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan penyelenggaraan suatu organisasi atau lembaga dalam satu periode, agar nantinya dapat digunakan guna membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan kebutuhan dalam pelaksanaannya.

Tujuan anggaran menurut Nafarin (2013: 19) yaitu sebagai (a) untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena anggaran menjadi lebih jelas dan nyata. (b) untuk merasionalkan sumber dana investasi agar mendapatkan hasil yang maksimal. (c) untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang terkait dengan keuangan. (d) untuk merinci jenis sumber daya yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga mampu mempermudah pengawasan. (e) untuk sarana komunikasi harapan pemimpin kepada pihak yang terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. (f) untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang dasar perlu tindakan koreksi. Adapun fungsi

dari anggaran yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasi kerja, sebagai alat untuk mengkoordinasi kerja, sebagai alat pengawasan kerja (Munandar, 2015:10).

4. Pengertian Partai Politik

Menurut Edmund Burke, partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu dengan tujuan untuk mempromosikan kepentingan skala nasional secara bersama-sama berdasarkan hal-hal dan prinsip yang telah disetujui secara bersama (Edmund, 2005). Menurut R. H. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir dan bertindak sebagai suatu kelompok kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaannya guna memilih serta menguasai pemerintahan dan merealisasikan kebijakan umum yang mereka miliki (Soltau, 1961:199). Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk membuat atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan tersebut mampu memberikan anggotanya manfaat yang bersifat ideal atau materil (Friedrich, 1967:415).

5. Fungsi Partai Politik

Partai politik telah menjadi salah satu ciri penting dalam sebuah politik modern sebab memiliki fungsi yang strategis. Fungsi partai politik yang utama dan umum adalah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan (Labolo dan Ilham, 2015:15). Untuk merealisasikan tiga fungsi partai politik tersebut, partai politik perlu melakukan penyeleksian calon-calon anggota, setelah terpilihnya calon-calon dari penyeleksian tersebut selanjutnya melakukan kampanye, setelah kampanye dilakukan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilaksanakan oleh partai politik adalah melaksanakan fungsi pemerintahan legislatif atau eksekutif.

Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik menurut Firmanzah (dalam Yoyoh dan Efriza, 2015:362) terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peran serta tugas internal dari organisasi, dalam hal ini partai politik menjalankan peran yang penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideology politik yang telah menjadi latar belakang dari berdirinya partai politik tersebut. Yang kedua adalah partai politik bersifat eksternal, dimana peran dan fungsi partai politik terkait masyarakat luas, bangsa dan negara. Dengan adanya partai politik juga memiliki

tanggung jawab konstitusional, moral, serta etika dalam membawa kondisi dan situasi dalam masyarakat untuk menjadi lebih baik.

Menurut Miriam Budiardjo, fungsi partai politik terdiri dari sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik (Miriam, 2008: 405-409). Fungsi partai politik tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Di masyarakat modern yang memiliki cakupan luas dan kompleks, menimbulkan banyak ragam pendapat dan aspirasi yang kian berkembang. Suatu pendapat seseorang atau kelompok, akan hilang seperti suara di padang pasir jika pendapat tersebut tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat orang lain yang senada. Proses dari pembahasan ini dinamakan sebagai penggabungan kepentingan atau *interest aggregation*. Setelah kepentingan tersebut digabungkan, pendapat yang terkumpul lalu diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses dari pembahasan tersebut dinamakan sebagai perumusan kepentingan atau *interest articulation*.

2) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam kajian ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana mereka berada. Mereka merupakan bagian dari adanya proses yang menentukan sikap politik seseorang, seperti terkait nasionalisme, suku bangsa, kelas sosial, ideology, hak dan kewajiban.

3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Dalam bagian fungsi ini memiliki kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal ataupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Dalam kepentingan internalnya, partai politik membutuhkan kader-kader yang memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya kader yang berkualitas, maka suatu partai politik mampu menjadi partai yang memiliki kesempatan lebih besar dalam melakukan perkembangan. Selain itu, partai juga tidak akan memiliki kesulitan dalam menentukan pemimpinnya dan memiliki peluang untuk mengajukan calon untuk masuk kedalam kepemimpinan nasional

4) Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam fungsi ini, potensi konflik akan selalu ada dalam kehidupan di masyarakat. Khususnya bagi masyarakat heterogen, apakah dari segi etnis, sosial-ekonomi, atau agama. Dengan adanya perbedaan tersebut, tentunya terdapat potensi konflik yang bisa terjadi. Jika keanekaragaman tersebut terjadi pada negara demokrasi, maka persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan memiliki tempatnya tersendiri.

Gabriel A. Almond (dalam Cholisin dan Nasiwan, 2012:112) berpendapat bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan pembuat kebijakan. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, juga menjelaskan tentang fungsi partai politik pada pasal 12 yaitu:

- 1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat lain agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyehatkan masyarakat.
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

6. Manajemen Organisasi Partai Politik

Dalam suatu organisasi pasti terdapat struktur manajemen yang pengelolaan dan pengurusannya untuk mengendalikan atau mengontrol dalam suatu organisasi, hal ini pun berlaku juga bagi partai politik. Pengelolaan dan pengurusan diterapkan pada partai politik dengan tujuan untuk menarik dan menghimpun apresiasi dari masyarakat untuk merealisasikan dan memperjuangkan suatu keinginan yang diharapkan oleh masyarakat dengan visi dan misi (Yuli Handayani, 2015:36).

Prinsip pokok pada keuangan partai politik yaitu akuntabilitas dan transparansi. Prinsip transparan mewajibkan untuk partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Kewajiban yang harus dilakukan tersebut seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat seluruh pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun.

Pengelolaan keuangan partai politik menurut Veri Junaidi, dkk (2011) sebagai berikut:

1. Pendapatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa terdapat lima jenis pendapatan partai politik, yaitu:

- a. Iuran anggota, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak membatasi besaran dari iuran anggota dan besaran sumbangan perseorangan anggota. Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa sumbangan perseorangan anggota diatur oleh AD/ART masing-masing partai politik.
- b. Sumbangan perseorangan anggota, pendapatan sumbangan perseorangan anggota juga tidak dibatasi seperti iuran anggota.
- c. Sumbangan perseorangan bukan anggota, sumbangan dalam jenis ini paling banyak jumlahnya adalah satu miliar rupiah per orang dalam jangka waktu satu tahun anggaran.
- d. Sumbangan badan usaha, organisasi atau badan usaha paling banyak memberikan sumbangan sebesar tujuh miliar lima ratus juta rupiah per organisasi atau badan usaha dalam periode satu tahun anggaran.
- e. Sumbangan negara, partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari APBN/APBD yaitu partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR/DPRD. Adapun besaran subsidi akan dihitung berdasarkan jumlah dari perolehan kursi yang didapatkan oleh masing-masing partai politik.

Dalam menghitung besaran jumlah dana subsidi APBN/APBD kepada partai politik yang meraih kursi di DPR, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 yang menghitung besarnya melalui dua tahap. Tahap pertama, menentukan besaran dana subsidi persuara yaitu jumlah APBN tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi pada periode sebelumnya. Tahap kedua yaitu dengan

melipatkan nilai subsidi per suara dengan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik pada periode ini. Dua tahap yang sudah dijelaskan tersebut berlaku juga dalam perhitungan besaran subsidi APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi atau kota.

2. Belanja

Komponen belanja pada partai politik tidak seperti komponen pendapatan partai politik yang secara jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, belanja pada partai politik tidak dibatasi sehingga dengan pendapatan yang ada pada partai politik dapat belanja atau melakukan kegiatan apapun dengan skala serta volume yang tak terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dijelaskan bahwa penerimaan subsidi negara diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 juga menegaskan penggunaan dana bantuan untuk operasional sekretariat seperti administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

3. Laporan Keuangan

Partai politik wajib menyusun laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan laporan arus kas. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu partai politik wajib menyusun laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik serta dibagikan secara periodik. Adapun tujuan dari hal tersebut agar laporan keuangan bisa diakses oleh publik, termasuk daftar penyumbang didalamnya.

4. Pelanggaran dan penerapan sanksi

Undang-undang dibuat guna mencapai suatu tujuan, adapun tujuan pokok peraturan keuangan politik yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah untuk menjaga kemandirian partai politik agar tetap berorientasi serta berjuang untuk kepentingan rakyat.

Maka dari itu, Undang-Undang tersebut membatasi besaran sumbangan dari pihak tertentu serta melarang partai politik untuk menerima sumbangan dari pihak tertentu.

Selain itu, agar pengelolaan keuangan partai politik bisa dikontrol publik, maka partai politik diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara periodik, diaudit akuntan publik dan juga BPK. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak akan berarti jika tidak disertai dengan sanksi terhadap para pelanggarnya. Maka dari itu, hukuman pidana untuk memberikan sanksi harus diberikan kepada pengurus partai politik yang melanggar aturan. Sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar ketentuan laporan penggunaan dana subsidi negara dan larangan menggunakan fraksi di MPR, DPR, dan DPRD sebagai sumber pendanaan partai politik.

Mekanisme pengelolaan keuangan partai politik wajib diatur dalam peraturan organisasi partai politik, hal ini perlu dilakukan demi membangun sistem organisasi modern agar lebih tanggap atas tuntutan konstituen dan publik yang terus meningkat. Peraturan ini juga akan mendorong partai politik untuk menjadi institusi yang berprinsip transparan dan akuntabel, sehingga hal tersebut dapat menghindari dari adanya penguasaan oleh pihak yang memiliki uang.

BAB III

PROFIL DPD PARTAI DEMOKRAT JAWA TENGAH

A. Sejarah Partai Demokrat

Partai Demokrat merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang telah didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM pada tanggal 10 September 2001 dan secara resmi berdiri pada tanggal 25 September 2001 dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat, lalu di tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI telah mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor 81 Tahun 2001 tentang Pengesahan Partai Demokrat beserta Lambang Partai Demokrat.

Faktor awal yang menjadikan Partai Demokrat didirikan yaitu berdasarkan landasan dari adanya inisiatif yang muncul dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak mengalami kekalahan pada masa pemilihan calon wakil Presiden dalam sidang MPR pada tahun 2001. Dengan adanya peristiwa tersebut, terdapat beberapa orang yang maju untuk mendukung SBY serta memikirkan bagaimana SBY mampu meraih kemenangan dan dapat memimpin negara dengan tidak hanya sebagai wakil namun dapat menjadi Presiden Republik Indonesia dengan membentuk partai politik.

Perancangan konsep dasar serta platform partai yang sebagaimana telah diinginkan oleh SBY tersebut dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dengan bantuan Tim dibawah pimpinan Vence Rumangkang dalam menyelesaikan teknis administrasinya. Selanjutnya di tanggal 12 Agustus 2001 diadakan forum rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di Apartemen Hilton. Didalam rapat tersebut membentuk tim yang setelahnya mengadakan pertemuan hampir setiap hari, tim tersebut terdiri dari Vence Rumangkang, Yani Wahid, Achmad Kurnia, Adhiyaksa Dault, Baharuddin Tonti, dan Shirato Syafel. Sejak pertemuan tersebut, berdasarkan perjuangan orang-orang yang terlibat membuahkan hasil dengan terbentuknya Tim 9 yang beranggotakan 10 orang dengan tugas mempertajam konsep pendirian Partai Demokrat, yaitu Vence Rumangkang, Ahmad Mubarak, Yani Wahid, Subur Budhisantoso, Irzan Tanjung, RMH. Heroe Syswanto Ns, RF. Saragjh, Dardji Darmodihardjo, Rizald Max Rompas, dan Rusli Ramli.

Ditengah perjalanannya tersebut, Partai Demokrat memiliki masalah yakni berdasarkan Undang-Undang Kepartaian bagi partai yang dapat disahkan membutuhkan lima puluh orang sebagai pendirinya, namun disaat itu terbit pemikiran agar tidak mengumpulkan lima puluh orang saja akan tetapi dilengkapi menjadi sembilan puluh sembilan orang agar memiliki makna dengan SBY sebagai penggagas karena SBY lahir ditanggal 9 bulan 9. Maka ditanggal 9 september 2001 di Gedung Graha Pratama lantai XI Jakarta Selatan, dihadapan notarus Aswendi Kamuli sebanyak 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi pendiri Partai Demokrat dan hadir untuk mentandatangani Akte Pendiri Partai Demokrat. 53 orang yang tidak bisa hadir pada saat itu tetap memberikan perannya dengan memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang, lalu Vence rumangkang menunjuk Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jendral serta Vence sendiri yang menjabat sebagai Bendahara Umum.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai demokrat pertama kali diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri secara langsung oleh seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam debut politiknya, Partai Demokrat memulainya dalam Pemilihan Legislatif pada tahun 2004 dan berhasil meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan meraih kursi DPR sebanyak 57 kursi. Dari hasil yang berhasil diraih, membuat Partai Demokrat duduk di peringkat lima pada Pemilu Legislatif Tahun 2004, hal ini menguntungkan karena menaikkan popularitas partai Demokrat dan juga SBY. Pada Pilpres 2004 merupakan laga Pilpres pertama dimana Partai Demokrat berhasil meraih kemenangan setelah mengusung pasangan calon Presiden bersama PBB dan PKPI yaitu SBY dan Jusuf Kalla dengan perolehan 60,62% suara. Di Pileg 2009 Partai Demokrat berhasil meraih 26,4% suara dan memperoleh 150 kursi DPR. Selain itu, Partai Demokrat juga berhasil mempertahankan kekuasaannya pada Pilpres 2009 dengan pasangan calon SBY dan Boediono yang diusung oleh PKS, PAN, PPP, dan PKB. Di pemilu 2014, Partai Demokrat memperoleh 10,19% suara nasional dan berada di posisi empat besar dari sepuluh partai yang ada di DPR. Selanjutnya dalam Pemilu 2019, Partai Demokrat

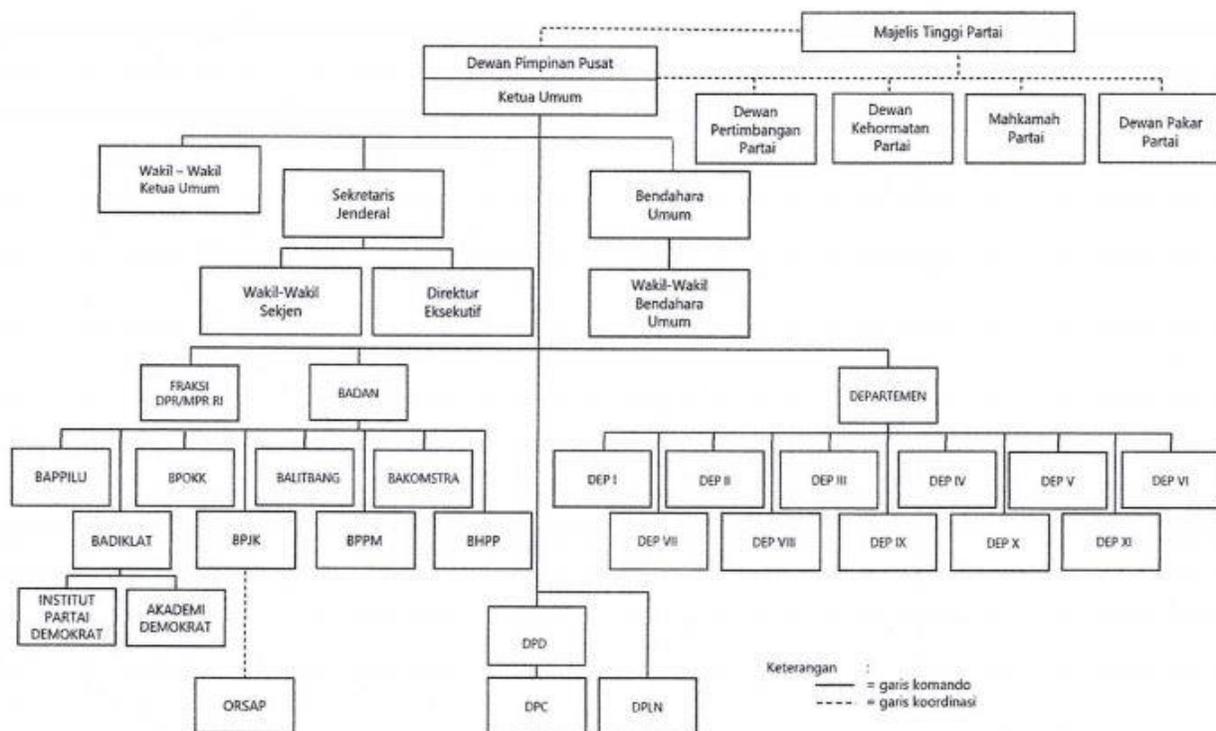
kembali mengalami penurunan dengan menduduki peringkat tujuh dari sembilan partai yang ada di DPR dengan perolehan suara 7,77%.

Di bawah ini adalah catatan nama-nama ketua umum partai Demokrat:

1. Subur Budhisantoso (Masa Bhakti 2001-2005)
2. Hadi Otomo (Masa Bhakti 2005-2010)
3. Anas Urbaningrum (Masa Bhakti 2010-2015)
4. Susilo Bambang Yudhoyono (Menggantikan Anas karena kasus korupsi tahun 2013)
5. Agus Harimurti Yudhoyono (Masa Bhakti 2020-2025)

B. Struktur Organisasi Partai Demokrat

Gambar 1 Struktur Organisasi Partai Demokrat



Sumber: demokrat.or.id

Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025.

Ketua Umum : H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.PA., M.P.A., M.A.

Wakil Ketua Umum : Dr. Benny Kabur Harman, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum : Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.
Wakil Ketua Umum : Dr. Drs. Yansen Tipa Padan, M.Si.
Wakil Ketua Umum : Hj. Vera Febyanthy Rumangkang, M.Si.
Wakil Ketua Umum : Willem Wandik, S.Sos.
Wakil Ketua Umum : Ir. Marwan Cik Asan, M.M.

Sekretaris Jendral : H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.

Wakil SekJen : Ir. Hj. Andi Timo Pangerang
Wakil SekJen : Putu Supadma Rudana, M.B.A.
Wakil SekJen : Renanda Bachtar
Wakil SekJen : Ingrid Kansli, S.Sos.
Wakil SekJen : Muhammad Rifai Darus, S.E.
Wakil SekJen : Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.H.
Wakil SekJen : Jansen Sitindaon, S.H., M.H.
Wakil SekJen : Imelda Sari, S.S.
Wakil SekJen : H. Irwan, S.I.P, M.P.
Wakil SekJen : Agust Jovan Latuconsina, M.Si (Han)., M.A.

Bendahara Umum : H. Renville Antonio, S.H., M.H., M.M.

Wakil Bendahara U : Eka Putra, S.E.
Wakil Bendahara U : Lasmi Indaryani, S.E.
Wakil Bendahara U : Tatyana S. Sutara, S.E., M.Si.
Wakil Bendahara U : Chairul Yaqin Hidayat, S.I.P.
Wakil Bendahara U : Edwin Jannerli Tandjung, S.E.
Wakil Bendahara U : Bramantyo Suwondo, M.M.IR.
Wakil Bendahara U : Indyastari Wikan, S.T., MT.Ars.
Wakil Bendahara U : Lokot Nasution, S.T.

Direktur Eksekutif : Sigit Raditya, M.I.S., M.A.

Wakil DE : Ir. Irawan Satrio Leksono, M.M.
Wakil DE : Ahdi Muqsith Mursalim, S.I.P.

Wakil DE : Emir Ahmad Zakaria, S.Kom.

BADAN-BADAN

Badan Pemenangan Pemilu

Kepala : **Andi Arief**
Deputi : M. Oki Isnaini, B.Sc., M.Sc., M.A.
Deputi : Rezka Octoberia, S.E.
Deputi : Daisy Margaret Silanno, S.Sn., M.Si.
Deputi : H. Imer Darius, S.E.
Deputi : Dr. Dra. Andi Nurpati, M.Pd.
Deputi : Rizaldi Kadir Situru

Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi

Kepala : **DR. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si.**
Deputi : SMR. Edi A., S.Sos., M.P.M.
Deputi : H. Jemmy Setiawan, S.H., M.H.
Deputi : Gana Febrana, S.I.P.
Deputi : Indriani Hadi.
Deputi : Harmusa Oktaviani, S.E.

Badan Penelitian dan Pengembangan

Kepala : **Herzaky Mahendra Putra, S.Sos., M.M.**
Deputi : Tomi Satryatomo, S.E.
Deputi : Syahrial Nasution
Deputi : Diska Putri Pamungkas, S.I.P., M.Sc.
Deputi : Yan Amarullah Harahap, S.E., S.H., M.M.
Deputi : Ajie Arifuddin, S.E., M.M.

Badan Komunikasi Strategis

Kepala : **Ossy Dermawan, B.S, M.Sc.**
Deputi : Ni Luh Putu Caosa Indryani, S.I.P., M.MM.

Deputi : Cipta Panca Laksana
Deputi : Yoyo Budianto
Deputi : Ricky Kurniawan Chairul, S.E.
Deputi : Gemintang Kejora Mallarangeng, M.A.

Badan Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan

Kepala : Yudha Pratomo Mahyuddin, M.Sc., Ph.D.
Direktur : Imam Subkhan, M.Hum., M.A.
Direktur : Dani Miftakhul Akhyar, S.T., M.Si.
Direktur : H. Iwan Rinaldo Syarief, S.E.
Direktur : Hilda Thawila, S.Sos.
Direktur : Panji Purboyo, S.E.

Badan Pembinaan Jaringan Konstituen

Kepala : Zulfikar Hamonangan, S.H.
Deputi : Steven J. Rumangkang, B.A.
Deputi : Nurseto Budi Santoso, S.E.
Deputi : Taufiqurrahman, S.H.
Deputi : Devita Prihartini
Deputi : A.S. Sukawijaya, S.E.

Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala : H. Ali Muhammad Johan C, S.E.
Deputi : Dina Lorenza Audria
Deputi : Eulis Widaningsih, S.E., M.M.
Deputi : Ilham Mendrofa, S.P., M.M.
Deputi : Lis Dedeh, S.H., S.E., M.M.
Deputi : dr. Dobind Dialdas, M.H.A

Badan Hukum dan Pengamanan Partai

Kepala : MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., C.L.A.
Deputi : Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H., LL.M., (GL)., LL.m. (EL)., Ph.D.

Deputi : H. Mehbob, S.H., M.H., C.N.
Deputi : M. Parulian S.

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen I Luar Negeri dan Keamanan Nasional

Kepala Departemen : Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M.
Wakil : Dr. Susilawati, S.E., M.M., M.Si. (Han).

Departemen II Politik dan Pemerintahan

Kepala Departemen : Umar Arsal, S.Sos.
Wakil : Nurcahyo Anggoro Jati, S.E.

Departemen III Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepala Departemen : Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.
Wakil : Panti Silaban, S.Kom, S.H., M.H.

Departemen IV Pertanian, Kehutanan, dan Kemaritiman

Kepala Departemen : Muslim, S.H.I., M.M.
Wakil : Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.

Departemen V Infrastruktur dan Perhubungan

Kepala Departemen : Dr. Michael Wattimena, S.E., M.M.
Wakil : Muhammad Nasir, S.H.

Departemen VI Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi

Kepala Departemen : Linda Megawati, S.E., M.Si.
Wakil : Elvira Sylviani Kaunang, S.T., M.M.

Departemen VII Energi, Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi

Kepala Departemen : Rusda Mahmud
Wakil : Drs. Ayub Khan, M.Si.

Departemen VIII Agama dan Sosial

Kepala Departemen : Dr. H. R. A. Munawar Fuad Noeh, M.Ag.

Wakil : Hj. Robiatul Adawiyah, S.E.

Departemen IX Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Kepala Departemen : Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.

Wakil : Kris Mandalina

Departemen X Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kepala Departemen : Dede Yusuf, M.E., S.T., M.Si., S.T., M.Si., Pol.

Wakil : Anita Jacoba Gah, S.E.

Departemen XI Perekonomian Nasional

Kepala Departemen : Sartono Hutomo, S.E., M.M.

Wakil : Siti Mufattahah, S.Psi.

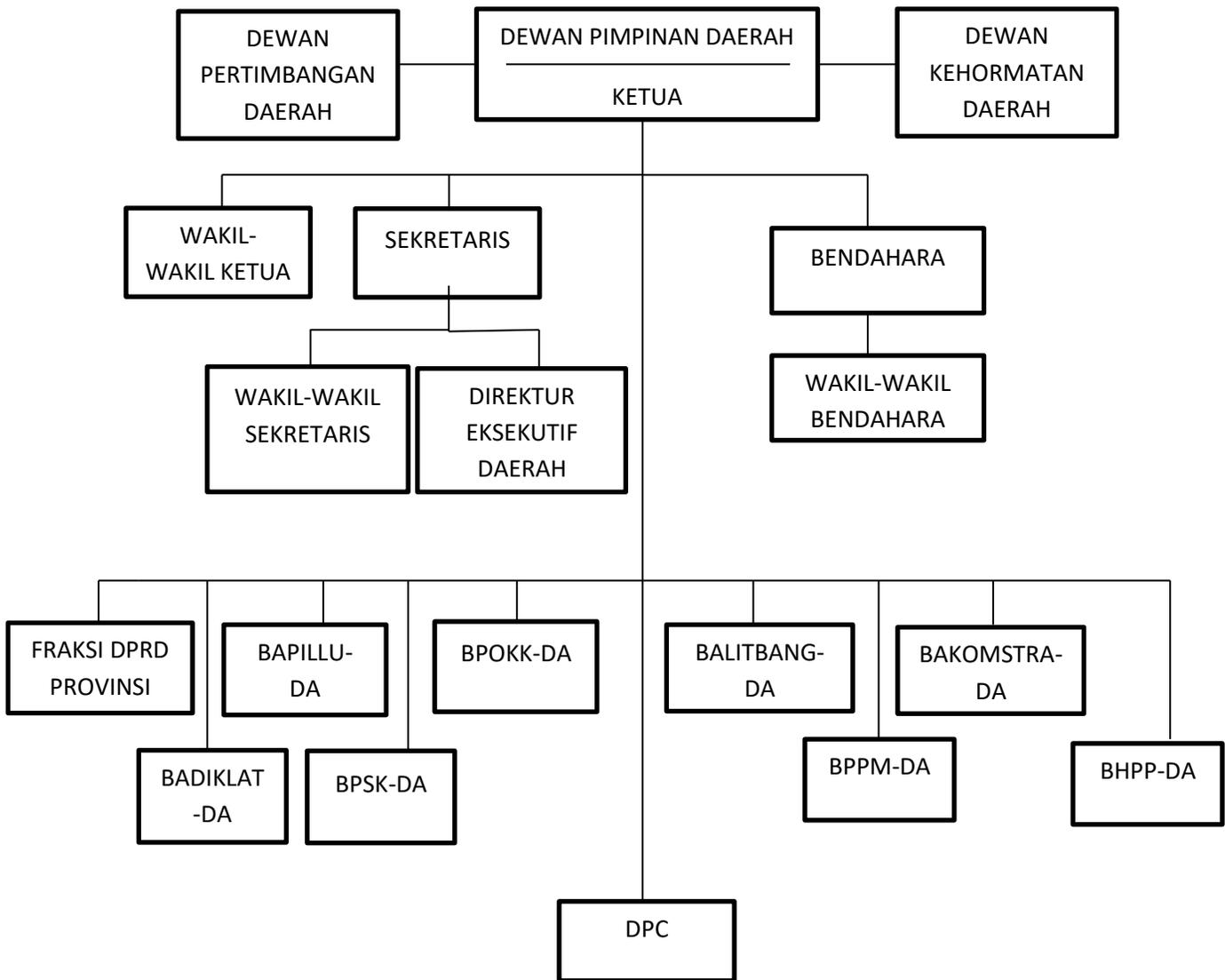
C. Ideologi Partai Demokrat

Dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 pada pasal 2 tentang Asas Partai dijelaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai yang berasaskan Pancasila. Selain itu, dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 Pasal 3 tentang Garis Ideologi Partai juga dijelaskan dalam Ayat (1) bahwa Partai Demokrat menganut garis ideology Nasionalis-Religius, Ayat (2) yaitu Partai Demokrat tidak memisahkan dan mempertentangkan nasionalisme dengan agama apapun, tetapi menyatukannya dalam kerangka yang konstruktif, rukun, dan damai. Nasionalisme yang dijiwai dan memancarkan semangat, wawasan, dan rasa kebangsaan mestilah disatukan dengan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas keagamaan. Karenanya, Partai Demokrat berpandangan bahwa salah dan menyesatkan jika paham kebangsaan (nasionalisme) haruslah dipertentangkan dengan paham keagamaan (termasuk Islam) dalam dunia politik di Indonesia.

Dengan Ideologi Nasionalisme-Religius yang ditanamkan, Partai Demokrat berupaya mengedepankan kepentingan rakyat atas dasar landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanism, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan dalam perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

D. Struktur Organisasi DPD Partai Demokrat Jawa Tengah

Grafik 1 Struktur Organisasi DPD Partai Demokrat Jawa Tengah



Sumber: DPD Partai Demokrat Jawa Tengah

**Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah
Masa Bhakti 2021-2026.**

Ketua : **Rinto Subekti, S.E., M.M.**
Wakil Ketua : H. Agus Bastian, S.E., M.M.
Wakil Ketua : Ivan Agusta, S.T.
Wakil Ketua : H. Bayu Jalar Prayogo, S.H., S.E., M.M.
Wakil Ketua : Joko Purnomo
Wakil Ketua : Ir. Sunar Nugroho, M.Si
Wakil Ketua : H. Helmy Turmudhi, S.E., M.M.
Wakil Ketua : Drs. J. Trijaningsih, M.Pd.
Wakil Ketua : Joko Haryanto, S.E., M.Si
Wakil Ketua : Drs. Tugiman, M.T.
Wakil Ketua : H. Husen Malik, T.S.H., M.M.

Sekretaris : **Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M.**
Wakil Sekretaris : Drs. Joko Saptono, M.Si
Wakil Sekretaris : Luqman Saifudin
Wakil Sekretaris : Swasti Aswagati, S.Psi., M.Sos.
Wakil Sekretaris : Gunung Imam Soebagijono, S.H.
Wakil Sekretaris : Hj. Lilia Rahmalia, A.md
Wakil Sekretaris : Santiko Wicaksono, S.E.
Wakil Sekretaris : H. Haryono, S.Sos., M.A.P.
Wakil Sekretaris : DR. Ferry Firmawan, S.T., M.T.
Wakil Sekretaris : Kukuh Birowo, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris : Anie Widyastuti
Wakil Sekretaris : Guruh Tri Adi Putra, S.Akun.

Bendahara : **Kholik Idris, S.E., S.H., M.Si.**
Wakil Bendahara : Muhammad Rafly Jovian Wibowo
Wakil Bendahara : Asrar Ashuring, S.E.
Wakil Bendahara : Hj. Istiwahyuni

Wakil Bendahara : Sebastian Wibowo
Wakil Bendahara : Banik Yoandanny

Direktur Eksekutif : Ali Mas'adi, S.T.

Wakil DE : Sih Winantu, B.A.

Wakil DE : Rohmadi, S.E.

Sekretaris : Fauziah Fitriani, S.E.

Anggota : Azis Kurniaji

Badan-Badan

Badan Pemenangan Pemilihan Umum Daerah (BAPILU-DA)

Ketua : H. Bambang Eko Purnomo, S.E., SH.

Wakil : Dodi Nurhadi, S.H.

Wakil : Daniel Christanto Budi Santoso

Wakil : Reza Malik Kustamtoko

Sekretaris : Wawan Haryono

Anggota : Aris Meli Erniawati, S.E.

Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Daerah (BPOKK-DA)

Ketua : Hj. Tety Indarti, S.H.

Wakil : Heri Fitriansyah, S.T., M.Si

Wakil : dr. Raja Faisal Mangunju Sitorus

Wakil : Letkol. Purn. Estu Patriot Sigit

Wakil : Bayu Wijoyo Mulyo, S.E.

Wakil : Diah Astuti

Sekretaris : Wahyu Kris Hantoro, S.T., M.M.

Anggota : Ali Imron, S.Ag

Anggota : Niswatul Umah, S.Far.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANG-DA)

Ketua : Dra. Wahyuning Chumaeson, M.Si

Wakil : Chotimah, S.Pd.
Wakil : R. Arief Triyoga Utama, A.Md., S.H.
Sekretaris : M. Syafiq

Badan Komunikasi Strategi Daerah (BAKOMSTRA-DA)

Ketua : Lim Riana
Wakil : Galuh Harmawan
Wakil : Agung Buwono
Sekretaris : Kemas Dendy Prihadibyanto

Badan Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BADIKLAT-DA)

Ketua : dr. Soesanto Gunawan, S.H., M.H., M.M.
Wakil : Budi Santosa
Wakil : Budi Hermanto
Sekretaris : Indra Nur Hidayat, S.H.

Badan Pembinaan Jaringan dan Kontituen Daerah (BPJK-DA)

Ketua : Taufiq Eko Priyatno
Wakil : Meika Fatmawati, S.E.
Wakil : Diah Maitasari, S.Pd.
Sekretaris : Fathiyah Vera Himawati, A.Md, S.E.

Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPPM-DA)

Ketua : Dyah Probondari, S.H., M.H.
Wakil : Istianah
Wakil : Hj. Muh Hakam Ulfi Ikfina, M.A.
Sekretaris : Andrian Ari Wibowo, S.H.

Badan Hukum dan Pengamanan Partai Daerah (BHPP-DA)

Ketua : Us Us Kurniwantoro, S.H., M.H.
Wakil : Suyono

Wakil : Bayu Prasetyo Nugroho, S.H.
Sekretaris : Anik Lestyorini, S.H.

Dewan-Dewan

Dewan Pertimbangan Daerah

Ketua : **Hj. Haritsah, S.I.P**
Wakil : H. Lilik Haryanto, S.E., M.Si
Sekretaris : Dyah Shintawati, S.E.
Anggota : H. Gunari A. Latief, M.Si

Dewan Kehormatan Daerah

Ketua : **H. Koh Suwindi, S.E.**
Wakil : Ir. Atyoso Muchtar, S.S.
Sekretaris : Djoni Tri Wibowo, S.Sos.
Anggota : Sujadi

E. Pengelolaan Keuangan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah

Berdasarkan Pergub Jawa Tengah No 40 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah Pasal 9 Ayat 2 dijelaskan bahwa penggunaan dana bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik minimal sebesar 60% dari keseluruhan dana bantuan politik. Artinya, Pemerintah menginginkan partai politik mampu membawa pengaruh positif terhadap perkembangan pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota partai dengan adanya pemberian dana bantuan politik bagi masing-masing partai.

DPD Partai Demokrat Jawa Tengah memperoleh dana bantuan politik sebesar Rp. 1.145.101.200,- pertahun dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Artinya jika melihat Pergub Jateng No. 40 Tahun 2019 Pasal 9 Ayat 2, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah perlu menggunakan minimal 60% dari 1.145.101.200,- untuk kegiatan pendidikan politik yaitu sebesar Rp. 687.060.720,- selama satu tahun.

Adapun bentuk kegiatan pendidikan politik dijelaskan dalam Pergub Jawa Tengah No. 40 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 3 antara lain:

- a. Seminar
- b. Lokakarya
- c. Dialog interaktif
- d. Sarasehan
- e. *Workshop*
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pendidikan politik perlu dilakukan karena mampu membawa dampak positif bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, meningkatkan partisipasi politik, dan meningkatkan perkembangan karakter serta kemandirian bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengurus partai politik harus mampu mengelola keuangan partai politik agar dapat menjalankan segala kebutuhan dan kegiatan yang telah dirancang, sekaligus mampu mengedepankan kegiatan pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat, seperti kegiatan-kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya.

DPD Partai Demokrat Jawa Tengah memiliki dua sumber keuangan, yaitu iuran anggota fraksi dan dana bantuan politik APBD Jawa Tengah. Keuangan yang masuk ke DPD Partai Demokrat Jawa Tengah diurus oleh Wakil Direktur Eksekutif Bagian Keuangan dibawah pengawasan bendahara. Untuk keuangan dari anggota fraksi dapat diberikan secara langsung atau transfer melalui Wakil DE, sedangkan dana bantuan politik melalui rekening Bank Jateng milik DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

Penggunaan keuangan partai dibagi menjadi dua, pendidikan politik dan operasional sekretariat partai. Pengelolaan keuangan, ketua bertanggungjawab mengontrol penggunaan keuangan partai. Ketua harus menjadikan pengelolaan keuangan partai memiliki tujuan utama terhadap peningkatan pendidikan politik dalam penggunaannya, karena partai politik merupakan salah satu media yang mampu membawa pengaruh terhadap peningkatan pendidikan politik baik bagi masyarakat ataupun anggota partai sesuai berdasarkan Pergub Jawa Tengah No. 40 Tahun 2019 Pasal

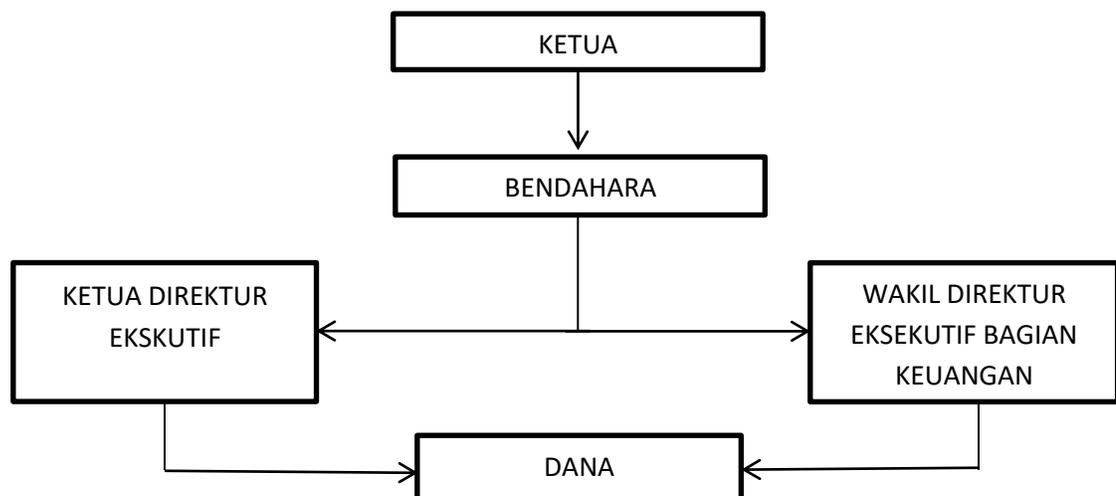
10 Ayat 1 dan Ayat 2. Seluruh kegiatan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah sangat memerlukan RAB agar ketua mampu mengontrol penggunaan keuangan partai.

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA PARTAI DEMOKRAT JAWA TENGAH

Pada penelitian ini menganalisis terkait pengelolaan keuangan partai politik yang fokus kepada Partai Demokrat di Provinsi Jawa Tengah, menurut Veri Junaidi pengelolaan keuangan partai politik meliputi beberapa aspek yaitu pendapatan, belanja, laporan keuangan, dan pelanggaran serta penerapan sanksi. Maka dari itu, pada bab ini akan memuat pembahasan seperti hal itu. Analisa dilakukan setelah sebelumnya mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara dan studi literature sebagai dokumen pendukung. Analisis ini juga menggunakan teori *Value For Money* (VFM) Audit, dalam teori ini menjadikan 3E's audit yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk memahami bahwa pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi akan dinilai berhasil dengan kemampuannya untuk memenuhi segala tugas sebagai bentuk usaha dengan dilakukan menggapai suatu target yang sudah ditetapkan dalam standar tinggi namun dengan pembiayaan yang rendah. Dalam hal ini melihat bagaimana kinerja yang dimiliki oleh pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam mengelola keuangan yang berusaha untuk mengelola keuangan agar mampu memenuhi semua kegiatan yang telah dirancang. Untuk mengelola keuangan, melibatkan beberapa pengurus partai seperti dibawah ini:

Grafik 2 Mekanisme Pengelolaan Keuangan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah



Sumber: DPD Partai Demokrat Jawa Tengah

A. Pengelolaan Pendapatan Keuangan DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah

Dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 pasal 96 ayat 1 diatur bahwa keuangan partai dapat diperoleh dari iuran anggota, iuran anggota fraksi pada semua tingkatan, sumbangan yang sah secara hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, tentunya bendahara menjadi peran penting dan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pendapatan partai. Dalam pelaksanaannya, bendahara dibantu oleh wakil direktur eksekutif yang memiliki peran khusus dalam bagian keuangan.

Di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah hanya memiliki dua sumber keuangan dari empat kemungkinan sumber yang bisa dimiliki, yaitu dari iuran anggota fraksi dan bantuan keuangan yang berasal dari APBD Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya sumber keuangan dari sumbangan pihak eksternal partai dan tidak ada iuran anggota partai.

“Karena memang selama ini tidak ada pihak luar partai yang menyumbangkan uang untuk partai, tapi mungkin saja ada sumbangan dari luar di DPP tapi itu kemungkinan saja. Kita juga tidak ada upaya untuk mencari donatur dari luar partai, karena menurut kita jika hal itu dilakukan nanti terkesan meminta-minta. Kita tidak ingin seperti itu, karena kita juga harus menjaga martabat partai ya” (Ali Mas’adi, 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut, tidak mungkin rasanya bagi partai sebesar partai Demokrat untuk keluar mencari donatur sebagai sumbangan untuk dijadikan sumber keuangan dari pihak luar partai. Sehingga mengharuskan Partai Demokrat Jawa Tengah mampu memanfaatkan keuangan yang berasal dari dua sumber tersebut agar mampu memenuhi segala kebutuhan didalam partai.

Untuk pendapatan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp. 1.145.101.200 per tahun hasil dari perolehan suaranya pada pemilu 2019 sebesar 954.351 suara dari 13 Dapil. Hal tersebut sesuai dengan Pergub Jawa Tengah No. 40 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Jawa Tengah pasal 3 Ayat 1 yang mengatur untuk besaran nilai bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. 1.200,- per suara sah.

Sedangkan keuangan yang diperoleh dari iuran anggota fraksi yaitu memiliki besaran secara keseluruhan sekitar 40 juta yang dibayar rutin perbulannya dari potongan gaji masing-masing anggota fraksi. Dapat disimpulkan, bahwa pendapatan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah secara keseluruhan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 1.625.101.200,-.

Mekanisme pembayaran iuran anggota fraksi yaitu uang iuran diberikan oleh anggota fraksi kepada Wakil Direktur Eksekutif Bagian Keuangan baik itu secara langsung berupa uang tunai ataupun melalui pengiriman transfer ke rekening wakil DE bagian keuangan yang kemudian uang tersebut akan dimasukkan kedalam keuangan partai dengan pencatatan serta tanda bukti. Pendapatan tersebut tentunya akan digunakan untuk kebutuhan dan kegiatan partai. Namun, khusus dana bantuan politik sebagaimana yang telah diatur dalam Pergub Jawa Tengah No. 40 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Jawa Tengah Pasal 9 Ayat 2 bahwa minimal penggunaan dana Banpol sebesar 60% harus digunakan untuk pendidikan politik. Hal tersebut membuat seluruh partai menekan penggunaan dana Banpol untuk kepentingan partai, karena perlu membuat sesuatu yang memberikan pengaruh positif atas peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat ataupun anggota partai. Dengan perolehan Dana Bantuan Politik sebesar Rp. 1.145.101.200,- pertahun yang diperoleh oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, maka minimal penggunaan dana yang harus digunakan untuk kepentingan peningkatan pendidikan politik anggota partai dan masyarakat sebesar Rp. 687.060.720,- pertahun.

“Kita juga tidak memiliki dana yang didapatkan dari pihak eksternal partai untuk kebutuhan pemilu seperti dana kampanye, jadi untuk keperluan seperti kampanye itu kita menggunakan keuangan internal yang sumbernya berasal dari iuran anggota fraksi untuk calon yang kita usulkan. Namun bagi kader yang memang mencalonkan diri secara keinginan pribadi dan memiliki rasa juang untuk memenangkannya, mereka juga akan menggunakan dana pribadi. Seingat saya memang pernah mendapatkan bantuan dana kampanye dari DPP, tapi untuk pemilu yang kemarin kita tidak mendapatkan. Artinya hal itu tidak konstan.” (Ali Mas’adi, 2022).

“Untuk pendapatan dari iuran anggota fraksi disini memiliki besaran dikisaran 40 juta secara keseluruhan yang dibayar oleh masing-masing anggota

fraksi dengan memotong gaji para anggota fraksi tersebut. Tentunya besaran tersebut tidak bisa dikatakan akan selalu sama setiap tahunnya, karena kita setiap periode akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas terkait iuran anggota fraksi tersebut. Dipertemuan tersebut melibatkan ketua, bendahara, sekretaris, dan seluruh anggota fraksi tentunya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk salah satunya menyepakati terkait besaran iuran yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota fraksi, karena untuk iuran anggota fraksi tentunya harus terdapat persetujuan dari seluruh pihak yang terkait. Hasilnya akan diputuskan oleh ketua” (Kholik Idris, 2022).

Dengan pendapatan tersebut, menjadi suatu tantangan bagi para pengurus sebagai perannya menjalankan partai politik. Tentunya hal ini perlu hubungan kerjasama yang baik bagi seluruh insan yang terkait. Untuk segala pendapatan yang masuk ke partai, tentunya yang memegang wewenang utama untuk menjaga dan mengelolanya adalah bendahara. Namun, bendahara dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil direktur eksekutif bagian keuangan. Jadi untuk uang bantuan politik biasanya akan diserahkan melalui transfer rekening Bank Jateng, sedangkan iuran anggota fraksi selain transfer mereka juga kerap memberikannya secara langsung kepada Kholik selaku bendahara atau Winantu selaku wakil DE bagian keuangan. Seluruh bentuk penerimaan keuangan, tentunya wajib untuk dilakukan pencatatan agar nantinya masuk ke laporan keuangan.

“Selama ini, di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah itu dana kampanye diperoleh dari pihak-pihak internal saja. Biasanya kalau ada kader yang memang dengan sendirinya berniat untuk nyaleg itu mereka memakai ataupun mencari modal sendiri, namun jika kita yang menyalonkan itu kita ikut membantu untuk masalah dana kampanye tersebut.” (Ali Mas’adi, 2023).

Gambar 3 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah

PARPOL	BANK	NOMOR REKENING	NOMOR NPWP	JUMLAH SALDO AWAL DALAM PEMBUKAAN REKENING
PKB	BANK JATENG	2057069093	02.185.371.8-023.000	Rp 10.500.000,00
GERINDRA			02.795.303.3-019.000	Rp 100.000,00
PDIP	BTN	001301500796851	02.795.303.3-019.000	Rp 100.000,00
GOLKAR	MANDIRI	1350000006039	02.121.484.6-031.000	Rp 1.000.000,00
NASDEM	BRI	032501002254300	02.881.785.6-076.000	Rp 1.000.000,00
GARUDA	BRI	100701000001544	73.421.376.2-023.000	RP 500.000
BERKARYA	BRI	060901000851566	81.267.667.4-503.001	Rp 100.000.000,00
PKS	MANDIRI SYARIAH	7735353537	02.160.809.6-508.001	Rp 1.000.000,00
PERINDO	MNC BANK	100010890001728	31.667.669.5-071.000	Rp 2.000.000,00
PPP	BANK JATENG	3057075634	02.192.571.4-503.001	Rp 5.000.000,00
PSI	BRI	100601000257303	75.009.479.9-072.000	Rp 1.000.000,00
PAN	BRI	032501002268309	01.866.617.2-015.000	Rp 100.000,00
HANURA	BRI	008301002523307	06.084.717.5-504.000	Rp 1.000.000,00
DEMOKRAT	BANK JATENG	3057067623	02.245.895.4-508.002	Rp 1.688.533,00
PBB	SYARIAH MANDIRI	7119889892	74.837.023.6-061.000	Rp 1.503.606,00
PKPI	BANK JATENG	3021189749	75.618.997.3-071.000	Rp 50.000,00
TOTAL				Rp 126.542.139,00

Sumber: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Untuk pendapatan dana kampanye, berdasarkan hasil dari pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) DPD Partai Demokrat Jawa Tengah memiliki jumlah saldo awal dalam pembukaan rekening sebesar Rp. 1.688.533,- pada pemilu 2019 dengan nomor rekening 3057067623 Bank Jateng serta nomor NPWP 02.245.895.4-508.002 (Bawaslu Prov. Jawa Tengah, 2019).

Gambar 4 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah

PARPOL	BANK	NOMOR REKENING	NOMOR NPWP	JUMLAH LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PKB	BANK JATENG	2057069093	02.185.371.8-023.000	Rp 1.735.246.500,00
GERINDRA			02.795.303.3-019.000	Rp 708.143.800,00
PDIP	BTN	001301500796851	02.795.303.3-019.000	Rp 597.107.000,00
GOLKAR	MANDIRI	1350000006039	02.121.484.6-031.000	Rp 0,00
NASDEM	BRI	032501002254300	02.881.785.6-076.000	Rp 78.010.000,00
GARUDA	BRI	100701000001544	73.421.376.2-023.000	Rp 3.500.029,00
BERKARYA	BRI	060901000851566	81.267.667.4-503.001	Rp 168.893.200,00
PKS	MANDIRI SYARIAH	7735353537	02.160.809.6-508.001	Rp 1.149.944.916,00
PERINDO	MNC BANK	100010890001728	31.667.669.5-071.000	Rp 1.819.615.201,00
PPP	BANK JATENG	3057075634	02.192.571.4-503.001	Rp 11.601,00
PSI	BRI	100601000257303	75.009.479.9-072.000	Rp 58.369.700,00
PAN	BRI	032501002268309	01.866.617.2-015.000	Rp 399.408.260,00
HANURA	BRI	008301002523307	06.084.717.5-504.000	Rp 90.486.180,00
DEMOKRAT	BANK JATENG	3057067623	02.245.895.4-508.002	Rp 1.202.440.588,00
PBB	SYARIAH MANDIRI	7119889892	74.837.023.6-061.000	Rp 11.138.858,00
PKPI	BANK JATENG	3021189749	75.618.997.3-071.000	Rp 0,00
TOTAL				Rp 7.946.341.304,00

Sumber: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Untuk laporan penerimaan sumbangan dana kampanye partai politik, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah menerima sumbangan dana kampanye sebesar Rp. 1.202.440.588,- pada pemilu 2019 (Bawaslu Prov. Jawa Tengah, 2019). Tentu hasil laporan tersebut sudah dilakukan audit melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah

ditunjuk oleh KPU Jawa Tengah dan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah ditunjuk kepada KAP Arnestesa oleh KPU Jawa Tengah.

Dana kampanye yang dimiliki oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah pada pemilu 2019 berdasarkan data Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan sumbangan dana kampanye yang berasal dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.204.129.121,-. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tersebut juga tercatat telah diserahkan kepada KPU pada tanggal 30 April 2019 tanpa adanya perbaikan ataupun suatu hal yang mencurigakan (Bawaslu Prov. Jawa Tengah, 2019).

“Kalo untuk penerimaan sumbangan dana kampanye itu kita memutuskan bahwa dana yang masuk untuk masing-masing caleg ya dana tersebut penyampaiannya langsung kepada caleg yang mendapatkan sumbangan tersebut, jadi dana sumbangan kampanye tersebut tidak harus diserahkan ke rekening partai. Karena menurut kita dengan mekanisme tersebut akan lebih simple dan mudah, jika salah satu caleg mendapatkan dana sumbangan lalu harus diberikan kepartai lalu caleg tersebut ingin menggunakan dana sumbangan yang didapat kan harus minta dulu kekita jadinya. Sehingga nantinya akan menjadi ribet dan aneh juga, karena harus meminta dananya sendiri ke partai untuk kegiatan yang ingin dilakukan caleg tersebut. Memang untuk dana kampanye itu boleh disampaikan kekita ataupun langsung kepada calegnya saja. Yang terpenting, para caleg harus memberikan laporan dana kampanye secara keseluruhan sehingga kita nantinya yang akan merekapitulasi laporan dana kampanye seluruh caleg yang akan dibuat laporan serta diserahkan kepada KPU sebagai syarat dan kewajiban kita sebagai partai politik.” (Ali Mas’adi, 2023).

DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam mengelola pendapatan keuangan partai dengan melihat salah satu konsep dari tiga konsep VFM Audit, yaitu konsep ekonomi dengan pengertian bahwa biaya input yang diterapkan didalam operasional organisasi dipastikan mampu diraih dengan sumber daya yang tersedia. Maka dalam pengelolaan keuangannya, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah tidak sepenuhnya memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mampu meraih sumber keuangan partai. Karena pengurus partai yang tidak menjalankan iuran anggota partai, seharusnya kesempatan

tersebut sangat membantu keuangan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah sehingga segala kegiatan dan kebutuhan partai dapat dipenuhi dengan maksimal. Hal tersebut menjadi sangat penting, mengingat partai politik merupakan salah satu bagian dari upaya untuk terus melakukan peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam melakukan partisipasi politik melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan politik. Dengan keuangan yang lebih baik, maka kegiatan partai termasuk pendidikan politik akan lebih maksimal pelaksanaan dan hasilnya.

B. Penetapan Rencana Pembelanjaan Partai

Penetapan rencana pembelanjaan partai di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dilaksanakan setiap periode untuk RAB (Rencana Anggaran Belanja) terkait kebutuhan yang dimiliki secara umum, karena RAB yang umum (operasional sekretariat) akan mengalami perkembangan dengan adanya perubahan pengurus partai. RAB yang umum biasanya berisi seperti perbaikan kantor, pembayaran upah pekerja, dan lain sebagainya.

Grafik 3 Contoh RAB Umum DPD Partai Demokrat Jawa Tengah

NO	RENCANA PEMBELANJAAN	JUMLAH	KET
1	Renovasi Bagian Belakang Kantor	Rp. 27.550.000	
2	Penambahan Unit AC untuk ruangan baru	Rp. 15.000.000	
	Jumlah Keseluruhan	Rp. 42.550.000	

Sumber: RAB Periode 2020-2025 DPD Partai Demokrat

Dalam penetapan RAB umum ini, biasanya diadakan rapat koordinasi dengan beberapa pengurus, seperti ketua, bendahara, sekretaris, dan direktur eksekutif beserta jajarannya. Dalam rapat koordinasi tersebut biasanya membahas terkait apa saja yang perlu dihapus dari RAB yang sebelumnya dan hal-hal yang perlu ditambahkan didalam RAB yang baru. Tentunya hal ini dilakukan agar terjadi efisiensi dalam penggunaan dana keuangan yang dimiliki untuk kedepannya, seperti pada teori VFM Audit berdasarkan pendapat dari Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa konsep efisiensi memiliki arti

output yang sudah maksimal bisa didapatkan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang ada.

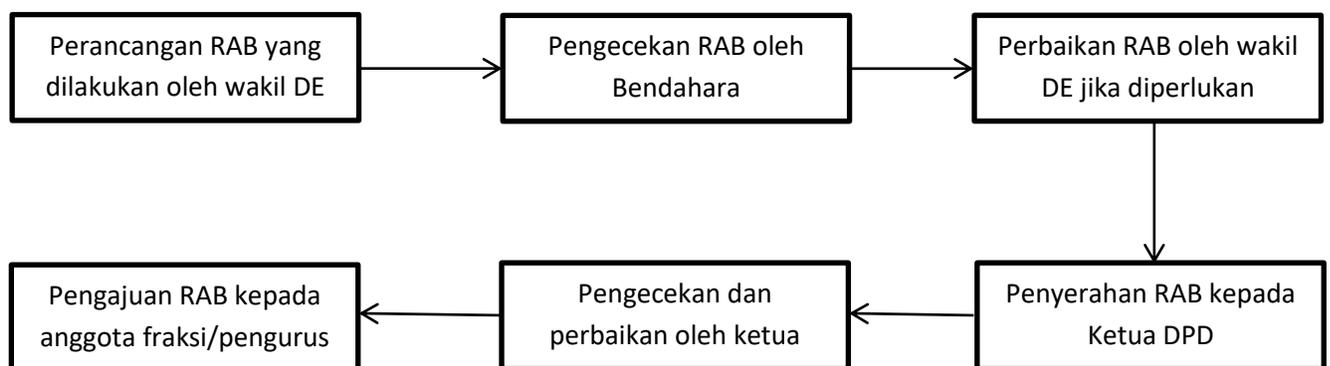
“Disini setiap ingin melaksanakan suatu kegiatan pasti mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu, tujuannya untuk mempersiapkan dan merancang kegiatan yang akan dilakukan. Dari situ akan terlihat, berapa anggaran yang dibutuhkan. Jika butuh anggaran yang besar dan kita merasa hal tersebut perlu adanya dana tambahan, maka biasanya akan diputuskan untuk perancangan RAB kegiatan tersebut yang tujuannya untuk mencari dana sumbangan untuk membantu kegiatan tersebut. Tapi hal tersebut sifatnya insidental, jadi tidak setiap pelaksanaan kegiatan kita akan melakukan hal tersebut. Melihat kondisi terlebih dahulu, jika memang kegiatan tersebut dilakukan menggunakan dana partai yang sudah dimiliki saja dapat terlaksana ya secara otomatis kita tidak akan mengajukan RAB untuk mendapatkan dana sumbangan.” (Sih Winantu, 2023).

Untuk pelaksanaan kegiatan partai seperti Musyawarah Daerah (MUSDA), Musyawarah Cabang (MUSCAB), dan lain-lain biasanya para pengurus partai akan mengadakan rapat koordinasi guna membahas terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi tersebut akan menghasilkan pembentukan kepanitiaan dan mengetahui besaran anggaran yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan untuk pengurus terutama ketua dapat mengetahui berapa besaran dana yang akan diperlukan dalam mengadakan kegiatan tersebut, selain itu juga untuk menentukan terkait penggunaan keuangan akan menggunakan keuangan partai secara keseluruhan atau diperlukan pengajuan sumbangan keuangan kepada anggota fraksi ataupun pengurus partai. Karena untuk melaksanakan suatu kegiatan pasti banyak keperluan yang membutuhkan pengeluaran anggaran, tidak hanya untuk penyewaan gedung ataupun konsumsi saja. Masih banyak hal-hal lainnya yang perlu dilakukan dari tahap persiapan acara, seperti kunjungan ke DPC untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar memiliki persiapan yang lebih matang. Untuk perjalanan dinas pun memerlukan pengeluaran anggaran, anggaran yang dikeluarkan berbeda-beda untuk perjalanan dinas tergantung dari berapa hari perjalanan.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, jika kegiatan tersebut memerlukan anggaran yang besar maka biasanya pengurus partai akan membuat keputusan untuk perancangan

RAB dari kegiatan tersebut dengan tujuan mencari dana sumbangan atau iuran kepada para pengurus untuk mendukung kegiatan tersebut dapat tetap terlaksana. Biasanya dalam hal tersebut bendahara akan mengajukan RAB untuk keterbukaan terkait kebutuhan dana yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan partai. Untuk skema pengajuan sumbangan kegiatan, dapat dijelaskan mengenai alurnya pada tabel dibawah ini.

Grafik 4 Sistematika Pengajuan Dana Sumbangan Kegiatan Kepada Pengurus atau Anggota Fraksi



Sumber: Winantu, 2022.

“Biasanya saya akan membuat RAB terlebih dahulu dibantu dengan staff yang lainnya disini, setelah itu nanti saya akan serahkan kepada bendahara. Nantinya bendahara akan melihat hasil dari RAB yang telah dibuat untuk suatu kegiatan, jika ada hal-hal yang tidak perlu dimasukkan kedalam RAB atau bendahara merasa didalam suatu rencana tersebut terdapat nominal yang terlalu besar atau kecil untuk hal tersebut nantinya akan dikembalikan kepada saya untuk direvisi RAB tersebut. Makanya dalam RAB tidak akan serta merta diajukan kepada anggota fraksi ataupun pengurus, kita akan se-selektif mungkin dalam perancangan RAB.” (Sih Winantu, 2023)

“Saya disinikan sebagai bendahara DPD ya, artinya saya memiliki kesadaran betul terkait pengelolaan keuangan disini. Untuk pembahasan terkait RAB, saya memang harus teliti betul terkait isi dari RAB tersebut. Karena saya tidak ingin dalam suatu kegiatan partai itu menggunakan dana yang terlalu

besar, akan tetapi hasilnya bisa kita dapat dengan penggunaan dana yang seharusnya tidak sebesar itu. Artinya saya memang tidak ingin seperti foya-foya dalam melaksanakan suatu kegiatan, kan yang terpenting suatu kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan para pengurus atau anggota yang lain pun merasa nyaman.” (Kholik Idris, 2023).

Dalam penetapan rencana pembelanjaan partai di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, semua hal akan diperlakukan dengan begitu selektif. Artinya pencegahan terkait penggunaan keuangan yang dikeluarkan secara sia-sia tidak ingin terjadi disini. Hal ini sangat baik mengingat di DPD Partai Demokrat Jawa tengah ini, hanya terdapat dua sumber keuangan saja yang dimiliki. Sumber keuangan dari bantuan keuangan politik dan iuran anggota fraksi, ditambah anggota fraksi dari partai demokrat di DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk periode saat ini hanya terdapat lima anggota. Dengan pendapatan partai secara keseluruhan sebesar Rp. 1.625.101.200,- dan perlu dipotong minimal Rp. 687.060.720,- sebagai ketentuan dari pemerintah Provinsi Jawa tengah yang mengharuskan parpol perlu menggunakan 60% dari seluruh pendapatan bantuan politik. Maka, keuangan DPD Partai Demokrat selama setahun jika dipotong 60% menjadi sebesar Rp. 938.040.480,- per-tahun. Hal ini membuat keselektifan para pengurus partai saat ini dalam penggunaan keuangan partai dapat dikatakan baik, karena berbeda dari partai besar lainnya di Jawa Tengah ini yang memiliki anggota fraksi serta perolehan suara pada pemilu 2019 yang lebih banyak sehingga dalam permasalahan sumber keuangan partai lebih mudah didapatkan jika dilakukan perbandingan dengan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

“Memang kita disini dalam setiap melakukan sebuah kegiatan, kita selalu berusaha menetapkan keperluan dana keuangan dengan sebaik mungkin. Kita juga tidak ingin didalam partai kita ini terdapat rasa yang tidak nyaman, baik itu dari kader ataupun para pengurus partai. Apalagi masalah keuangan, kita tahu dimanapun yang namanya keuangan akan menjadi suatu hal yang sensitif dan perlu berhati-hati dalam mengelolanya. Apalagi menyangkut orang banyak, tidak hanya satu atau beberapa orang. Maka dari itu, saya selalu menegaskan kepada pengurus yang lainnya bahwa keuangan kita harus dipergunakan dengan penuh

manfaat. Artinya, saya tidak ingin terdapat penggunaan keuangan yang manfaatnya tidak terlalu dimiliki. Apalagi penggunaan keuangan yang didapat dari sumbangan anggota fraksi atau seorang pengurus, kita harus membuat nilai positif dalam penggunaannya. Seperti jelas dalam penggunaannya, tidak bersifat boros, ataupun hal yang lainnya yang membuat seseorang yang memberikan sumbangan tersebut merasa puas dan senang terhadap kinerja kita.” (Rinto Subekti, 2022).

Dalam pengeolaan keuangan yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, maka konsep efisien telah tertanam dengan keseriusannya mengelola keuangan partai. Hal ini bertujuan untuk DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mudah dalam melaksanakan segala kegiatan kepartaiannya dan memenuhi segala kebutuhan yang ada didalamnya. Maka dari itu, RAB yang dirancang di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah selalu selektif agar tidak terjadi pengeluaran keuangan yang seharusnya tidak diperlukan. Termasuk juga pada RAB umum yang selalu dirancang kembali setiap periodenya, agar terciptanya konsep efisien dalam pengelolaan keuangan partai. Sesuai dengan teori *Value For Money* (VFM) Audit yang memiliki tiga konsep yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektif. Yang dimana konsep efisien telah tertanam di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam menetapkan rencana pembelanjaan partai. Selain itu, dengan adanya rapat koordinasi terkait RAB menyebabkan timbulnya rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan di periode selanjutnya sesuai dengan teori VFM Audit.

Dengan tertanamnya konsep efisien dalam pengelolaan belanja partai, maka dengan keuangan partai yang sedikit membuat DPD Partai Demokrat Jawa Tengah masih mampu untuk memenuhi kegiatan pendidikan politik. Artinya, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah masih menjalankan perannya sebagai partai politik yang harus memberikan pengaruh bagi peningkatan pendidikan politik bagi anggotanya maupun bagi masyarakat. Hal ini dapat diperkuat dengan data yang diperoleh melalui Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik Per Kegiatan Tahun Anggaran 2021 DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, menjadi bukti nyata bahwa efisiensi dalam mengelola penggunaan keuangan partai mampu menjadikan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah tetap mematuhi Pergub Jawa Tengah No. 40 Tahun 2019 yang mewajibkan

penggunaan dana Bantuan Politik minimal 60% untuk pendidikan politik ditengah kondisi keuangan partai yang sedikit. Dari laporan tersebut, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah menggunakan 64% dana bantuan politik atau sebesar Rp. 732.864.768,- dengan melaksanakan kegiatan Rakorda, Sarasehan, MusDa, dan MusCab.

C. Penyusunan Dan Keterbukaan Laporan Keuangan di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah

Dalam pengelolaan keuangan, tentunya laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting. Di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, pelaksanaan terkait laporan keuangan wajib dilakukan dalam rentang waktu setiap bulan dan setiap tahun. Jadi, terdapat dua jenis laporan keuangan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yaitu laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan dilaksanakan oleh wakil Direktur Eksekutif bagian keuangan yang diserahkan tugas kepada Sih Winantu, sedangkan yang bertanggung jawab terkait laporan keuangan partai yang dilaksanakan oleh Sih Winantu yaitu bendahara partai yang dijabat oleh Kholik Idris.

Laporan keuangan partai pun terdapat dua jenis laporan keuangan berdasarkan sumber keuangan, yaitu laporan keuangan yang bersumber dari internal partai dan laporan keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan politik menggunakan APBD Provinsi Jawa Tengah. Isi dari laporan keuangan tersebut terdiri dari:

1. Waktu penggunaan uang
2. Latar belakang kegiatan/agenda dalam penggunaan uang
3. Jumlah debit, kredit, dan saldo
4. Bukti penggunaan keuangan

Grafik 5 Contoh Laporan Keuangan Kas Umum DPD Partai Demokrat Jawa Tengah

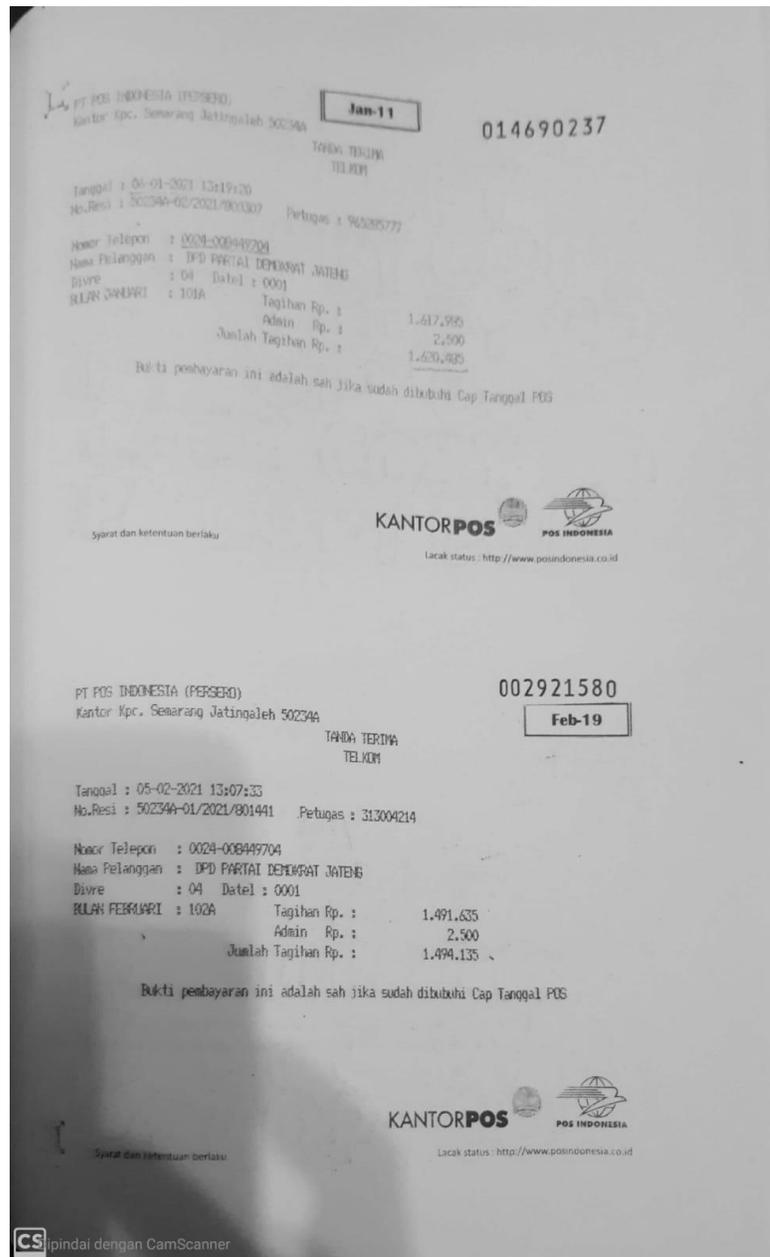
Tgl/Bulan	No Bukti	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
14-Jun-21	BPK-27.1	Penerimaan dari Pemerintah	1.145.101.200		1.145.101.200

		Provinsi Jateng			
23-Jun-21	Jun-43.1	Musda ke-3 Tgl 15-17 Juni 2021		306.236.038	838.865.162

Sumber: LRRPBB Keuangan Partai Politik DPD Partai Demokrat Jawa Tengah 2021

Didalam laporan keuangan, terdapat macam-macam kode yang tujuannya untuk menyesuaikan dengan tanda bukti penggunaan keuangan yang wajib diterterakan didalamnya. Karena untuk bukti penggunaan keuangan ditempel didalam laporan keuangan setelah tabel rincian laporan keuangan telah selesai dibuat, sehingga membutuhkan kode agar mempermudah pengguna dalam memeriksa kesesuaian laporan penggunaan keuangan dengan tanda buktinya. Kode tersebut dibagi berdasarkan jenis penggunaan keuangan, missal untuk gaji staff kantor memiliki kode GJ, untuk penerimaan dana banpol memiliki kode BPK. Setelah itu, terdapat angka selanjutnya untuk lebih memudahkan jika dilakukan pengecekan kesesuaian transaksi dengan tanda bukti agar tidak tertukar.

Gambar 4 Contoh Bukti Transaksi Penggunaan Keuangan Sebagai Lampiran Dalam Laporan Keuangan



Sumber: Dok. Pribadi

Untuk bukti transaksi penggunaan keuangan partai ditempel langsung kedalam laporan keuangan, jadi bukan dijadikan dalam bentuk scan ataupun dalam bentuk yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam setiap bukti transaksi akan ditempel kode-kode khusus sesuai dengan jenis penggunaan keuangan serta sesuai dengan waktu (bulan) dimana transaksi tersebut terjadi.

“Untuk laporan keuangan saya sendiri yang ditugaskan untuk membuat itu, jadi saya harus menyusun laporan keuangan itu setiap bulan yang nantinya akan saya serahkan kepada bendahara partai. Selain itu, saya juga harus menyusun laporan keuangan tahunan yang nantinya juga sama akan saya serahkan kepada bendahara partai. Untuk itu saya harus menyimpan semua tanda bukti pemakaian keuangan dalam hal apapun, seperti pembelian barang atau pembayaran atas suatu hal. Setelah saya buat, nantinya bendahara akan melihat terkait pengelolaan keuangan partai tersebut. Jika ada suatu hal yang tidak sewajarnya, nantinya saya akan dipanggil untuk mengkonfirmasi terkait laporan keuangan itu dan kalau ada kesalahan pastinya akan direvisi oleh saya.” (Sih Winantu, 2022).

“Kita disini untuk masalah keuangan harus jelas pemakaian ataupun pengelolaannya, maka dari itu kita mewajibkan untuk pengelolaan keuangan itu wajib menterterakan bukti dari penggunaan keuangan itu seperti struk. Hal itu tujuannya jelas untuk menghindari kecurigaan dan membuktikan bahwa penggunaan keuangan disini dilakukan dengan sejujur mungkin, kita juga sangat menghindari untuk terjadinya penyalahgunaan keuangan partai. Dengan cara itu, tentunya memperkecil kemungkinan untuk terjadinya penyalahgunaan keuangan dan juga menghindari kecurigaan oleh pihak terkait.” (Ali Mas’adi, 2022).

Setelah laporan keuangan dibuat oleh bagian keuangan serta diperiksa oleh bendahara partai dan dinyatakan baik yang artinya semua penggunaan keuangan sudah jelas tidak ditemukan kejanggalan, bendahara akan mentandatangani terkait laporan keuangan tersebut sebagai bukti bahwa laporan pengelolaan keuangan partai tersebut sudah diperiksa dan dinyatakan sudah baik serta siap bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

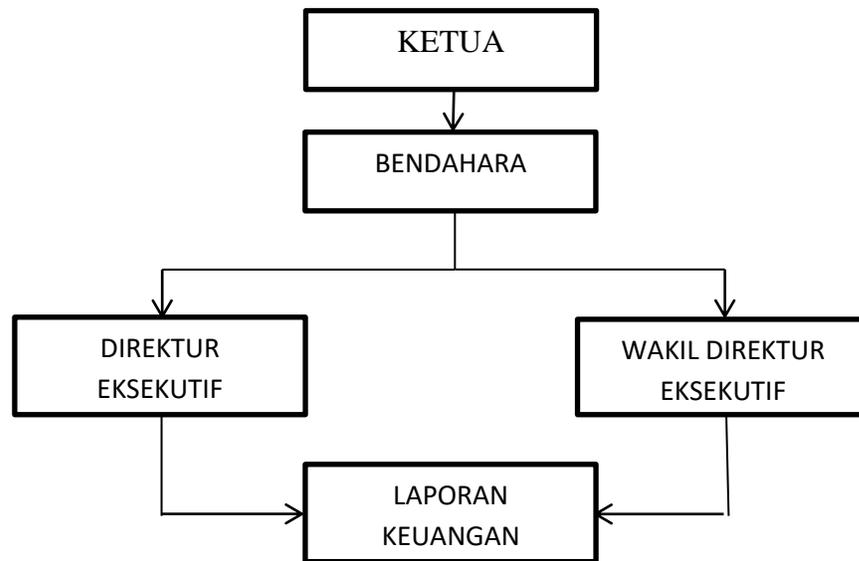
Direktur Eksekutif (DE) partai bertugas mendampingi wakil DE dalam tanggung jawabnya dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, artinya Direktur Eksekutif akan selalu mengontrol kinerja wakilnya dalam penyusunan laporan keuangan tersebut seperti mengecek kinerja wakil DE sudah atau belum menyusun laporan bulanan atau tahunan, membantu mencari solusi untuk penyelesaian jika terdapat masalah-masalah yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan, atau melihat bagaimana laporan keuangan yang disusun tersebut.

“Saya sebagai Direktur Eksekutif, dalam arti saya adalah ketua untuk Bu Winantu sebagai kepengurusan keuangan. Jadi secara kepengurusan saya juga memiliki tanggung jawab atas kinerja wakil saya, maka dari itu saya sering untuk sekedar mengingatkan Bu Winantu apakah laporan keuangan sudah dibuat atau belum, melihat hasil dari laporan keuangan tersebut, dan saya juga membantu jika Bu Winantu memiliki masalah dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.” (Ali Mas’adi, 2022).

Setelah laporan keuangan telah dinilai baik oleh bendahara serta ditandatangani, bendahara akan menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah sebagai pemangku kepentingan utama dalam segala hal terkait kepengurusan partai termasuk pengelolaan keuangan. Ketua juga tidak serta merta menerima laporan keuangan, akan tetapi juga akan diperiksa terlebih dahulu apakah laporan keuangan tersebut sudah bersih atau terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam penyusunannya.

“Untuk laporan keuangan itu biasanya saya tugaskan kepada Bu Win, dia kan selaku wakil DE khusus dibidang keuangan jadi dia yang membantu saya untuk mengelola keuangan partai. Karena saya selain jadi bendahara disini, saya juga punya tanggung jawab sebagai anggota dewan di DPRD Provinsi jadi saya perlu bantuan beliau untuk mengelola keuangan. Jadi, saya yang memeriksa dan bertanggung jawab atas laporan keuangan itu sebelum saya serahkan kepada ketua.” (Kholik Idris, 2022).

Grafik 6 Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan



Sumber: DPD Partai Demokrat Jawa Tengah

“Kalo meng-audit laporan keuangan itu ya kita sendiri, karena mau pake uang siapa kita untuk membayar lembaga auditor. Lagipula kan saya juga termasuk pekerja karena memiliki gaji disini, jadi ya lebih baik menugaskan saya untuk membuat audit laporan keuangan partai. Agar tidak menambah penggunaan keuangan partai, ini juga termasuk salah satu bentuk dari kebijaksanaan kita disini dalam mempergunakan keuangan partai dalam segala hal.” (Sih Winantu, 2022).

Untuk pengauditan dari laporan keuangan di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, pengauditan dilakukan secara mandiri yang artinya mereka tidak menggunakan lembaga auditor dari luar partai. Karena kepengurusan partai dibagian Direktur Eksekutif beserta jajarannya juga dapat dikatakan sebagai staff kantor, yang artinya kinerja yang mereka miliki serta lakukan diberikan gaji perbulan yang penggunaan keuangannya tersebut termasuk kedalam bagian operasional sekretariat partai. Maka dari itu, yang meng-audit laporan keuangan partai adalah Sih Winantu selaku wakil Direktur Eksekutif bagian keuangan.

Untuk dana kampanye, laporan keuangan dana kampanye harus diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dengan penerimaan sumbangan dana kampanye yang secara langsung dikelola oleh masing-masing caleg, maka dari itu para caleg tersebut perlu memberikan laporan terkait dana kampanye kepada pengurus partai. Sehingga, pengurus partai akan merekapitulasi hasil dari laporan dana kampanye yang telah diserahkan oleh masing-masing caleg yang nantinya akan diserahkan kepada auditor yang telah ditunjuk oleh KPU. Setelah itu, laporan yang telah terbentuk tersebut diserahkan kepada KPU sebagai syarat yang perlu dilaksanakan. Pada Pemilu 2019, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah terbukti memiliki kinerja yang baik dengan sikapnya yang patuh serta disiplin terhadap perintah maupun aturan yang berlaku pada pemilu.

Grafik 7 Mekanisme Laporan Dana Kampanye



Sumber:KPU Provinsi Jawa Tengah

Gambar 5 LADK Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah

PARPOL	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN PERBAIKAN/TIDAK PERBAIKAN
			MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	
PKB	23-Sep-18	11.24 WIB	120		TIDAK PERBAIKAN
GERINDRA	23-Sep-18	16.19 WIB	120		PERBAIKAN
PDIP	23-Sep-18	13.55 WIB	120		TIDAK PERBAIKAN
GOLKAR	23-Sep-18	14.18 WIB	119		PERBAIKAN
NASDEM	23-Sep-18	17.58 WIB	119		PERBAIKAN
GARUDA	23-Sep-18	11.32 WIB	19		PERBAIKAN
BERKARYA	23-Sep-18	17.23 WIB	64		PERBAIKAN
PKS	23-Sep-18	13.29 WIB	109		PERBAIKAN
PERINDO	23-Sep-18	12.28 WIB	66		PERBAIKAN
PPP	23-Sep-18	08.00 WIB	116		PERBAIKAN
PSI	23-Sep-18	14.00 WIB	24		PERBAIKAN
PAN	23-Sep-18	15.18 WIB	120		PERBAIKAN
HANURA	23-Sep-18	14.40 WIB	37		PERBAIKAN
DEMOKRAT	23-Sep-18	13.31 WIB	119		TIDAK PERBAIKAN
PBB	23-Sep-18	16.07 WIB	46		PERBAIKAN
PKPI	23-Sep-18	12.15 WIB	1		PERBAIKAN

Sumber: Bawaslu Prov. Jawa Tengah

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa DPD Partai Demokrat Jawa Tengah bersikap disiplin dengan kepatuhannya menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 2019 dengan tepat waktu dan tanpa ada perbaikan bagi seluruh calon legislatif dari partai demokrat. Artinya, kontribusi antara caleg dan pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah memiliki sinergi yang baik dalam kinerja yang dilakukan.

Gambar 6 Laporan Pengawasan LPPDK Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah

JENIS PEMILU	PARTAI POLITIK	MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT	WAKTU/HARI/TANGGAL /BULAN/TAHUN	PENYERAHAN TANDA TERIMA WAKTU/HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN
DPRD PROVINSI	PKB	√	-	√	-	14:17 / Jum'at, 26-April-2019	15:00 / Jum'at, 26-April-2019
	GERINDRA	√	-	√	-	10.00 / Selasa, 30 April 2019	15.00 / Selasa, 30 April 2019
	PDIP	√	-	√	-	13.05 / Rabu, 1 Mei 2019	15.15 / Rabu, 1 Mei 2019
	GOLKAR	√	-	√	-	11:10 / Senin, 29 April 2019	15:20 / Senin, 29 April 2019
	NASDEM	√	-	√	-	15:21 / Rabu, 1 Mei 2019	15:30 / Rabu, 1 Mei 2019
	GARUDA	√	-	√	-	11:04 / Rabu, 1 Mei 2019	11:15 / Rabu, 1 Mei 2019
	BERKARYA	√	-	√	-	16:30 / Selasa, 30 April 2019	17:00 / Selasa, 30 April 2019
	PKS	√	-	√	-	13:15 / Selasa, 30 April 2019	14:00 / Selasa, 30 April 2019
	PERINDO	√	-	√	-	11:00 / Selasa, 30 April 2019	11:30 / Selasa, 30 April 2019
	PPP	√	-	√	-	11:25 / Selasa 30 April 2019	12:00 / Selasa 30 April 2019
	PSI	√	-	√	-	13:34 / Minggu 28 April 2019	14:00 / Minggu 28 April 2019
	PAN	√	-	√	-	16:30 / Selasa, 30 April 2019	16:45 / Selasa, 30 April 2019
	HANURA	√	-	√	-	09:38 / Rabu, 1 Mei 2019	16:00 / Kamis, 2 Mei 2019
	DEMOKRAT	√	-	√	-	10:50 / Selasa, 30 April 2019	11:00 / Selasa, 30 April 2019
		PBB	√	-	√	-	16:00 / Kamis, 2 Mei 2019
	PKPI	√	-	√	-	17:31 / Kamis, 2 Mei 2019	17:40 / Kamis, 2 Mei 2019

Sumber: Bawaslu Prov. Jawa Tengah

Data diatas menunjukkan bahwa DPD Partai Demokrat Jawa Tengah memenuhi salah satu dari syarat keikutsertaan pada pemilu 2019, yaitu melakukan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dengan tepat waktu. Tercatat bahwa DPD Partai Demokrat Jawa Tengah menyerahkan laporan tersebut pada 30 April 2019 pukul 10.50 WIB.

Berdasarkan hasil yang ditemukan terkait penyusunan laporan keuangan di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, terdapat penerapan konsep efektif dalam teori VFM Audit. Dimana konsep efektif adalah ketersediaan ataupun hasil atas jasa dalam suatu organisasi mampu memberikan pelayanan dalam hal kebutuhan penggunaan jasa secara tepat (Mardiasmo, 2018). Ketersediaan mekanisme penyusunan laporan keuangan yang telah dibahas sebelumnya tercipta berdasarkan kinerja para pengurus partai, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif. Dengan menghasilkan laporan keuangan partai yang

dibuat secara jelas, alur pemeriksaan laporan keuangan antar pengurus yang detail, dan ketepatan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam mengurus Laporan Dana Kampanye pada pemilu 2019.

“Keuangan partai itu pada dasarnya tidak bisa dibuka secara sembarangan, para anggota ataupun kader memang tidak diperkenankan untuk mengetahui ataupun melihat semua hal yang terkait dengan keuangan partai jika tidak ada kepentingan ataupun mengharuskan seseorang mengetahui keuangan partai. Karena kan lagi-lagi saya katakan bahwa keuangan itu dimanapun menjadi hal yang sensitif untuk dibuka-buka secara sembarangan, harus ada alasan atau faktor yang penting untuk kita bisa membuka terkait keuangan partai.” (Ali Mas’adi, 2022).

Keterbukaan keuangan di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah tidak memperkenankan siapapun termasuk anggota ataupun kadernya sembarangan mengakses keuangan partai, karena privasi menjadi alasan mereka tidak secara terbuka mengenai informasi keuangan partai. Tidak adanya iuran anggota partai merupakan salah satu faktor yang membuat pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah secara tegas untuk menutup akses informasi keuangan partai, karena tidak adanya tanggung jawab dari pengurus untuk memberikan informasi keuangan partai kepada siapapun tanpa latar belakang yang signifikan. Mereka melakukan hal tersebut juga untuk menghindari kebocoran informasi mengenai keuangan yang mereka miliki, mereka tidak ingin siapapun pihak dari luar kepengurusan partai mengetahui privasi politik yang mereka miliki. Untuk dapat mengakses informasi keuangan tersebut, perlu adanya latar belakang yang penting untuk menjadi sebuah faktor bagi mereka membuka informasi mengenai keuangan partai. Selain itu, perlu juga beberapa perjanjian terkait pertanggung jawaban pengurus ataupun pemohon informasi keuangan agar dapat menjaga kerahasiaan informasi keuangan tersebut.

D. Kebijakan Pelanggaran Serta Penerapan Sanksi Kebijakan

Dalam pengelolaan keuangan partai politik, perlu diterapkannya empat unsur didalam pengelolaannya yaitu pendapatan, belanja, laporan keuangan, serta pelanggaran dan penerapan sanksi (Veri Junaidi, 2011). Pelanggaran dan penerapan sanksi kebijakan

menjadi suatu hal yang wajib diterapkan dilembaga atau organisasi manapun. Karena dalam lembaga atau organisasi, keuangan dikelola untuk merealisasikan visi dan misi yang telah disepakati menjadi satu arah tujuan oleh beberapa orang didalamnya. Maka dari itu, kebijakan terkait pengelolaan keuangan perlu mengandung unsur hukum untuk menghindari adanya tindak kecurangan atau penyalahgunaan keuangan. Apalagi didalam partai politik, di partai politik tidak hanya terdapat keuangan yang didapat dari pihak internal partai saja. Akan tetapi juga terdapat keuangan yang sumbernya berasal dari pemerintah, yang dimana keuangan tersebut berasal dari rakyat. Maka dari itu, kebijakan terkait pengelolaan keuangan di partai politik harus tegas dan jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan termasuk uang rakyat didalamnya.

Di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, pada realitanya tidak terdapat peraturan tertulis yang secara rinci mengatur terkait segala bentuk pelanggaran yang mungkin dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan partai. Tidak terdapat peraturan yang dibuat secara internal oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dan hanya mengikuti AD/ART Partai Demokrat yang dibentuk di Daerah Pimpinan Pusat (DPP).

“Kita gak ada peraturan kalau melakukan penyalahgunaan uang akan dikenakan sanksi seperti ini, kalau melakukan kecurangan terkait keuangan partai akan dikenakan sanksi seperti itu. Tapi jika ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dari salah satu diantara kita disini, tentu kita akan melaporkan hal tersebut kepada ketua kita. Tindakan pertama yang pasti kita lakukan adalah melakukan pemanggilan kepada pihak yang dicurigai melakukan kesalahan tersebut, jika memang terbukti melakukan hal tersebut tentunya kita akan menuntut pihak tersebut untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut dan memberikan surat peringatan.” (Ali Mas’adi, 2022).

“Memang kita tidak memiliki peraturan tertulis untuk hal tersebut, tetapi bukan berarti kita mengabaikan suatu hal negatif yang kemungkinan bisa terjadi itu. Tentunya kita akan memeriksa, menuntut pertanggungjawaban, dan memberikan surat peringatan. Jika satu pihak masih melakukan pelanggaran disini prosesnya masih sama, akan tetapi kita tidak akan segan untuk mengeluarkan pihak tersebut dari partai ini dan membawa permasalahan

tersebut ke ranah hukum yang berlaku di Indonesia jika pihak tersebut tidak memiliki upaya untuk bertanggung jawab.” (Rinto Subekti, 2022).

Tujuan dari hal yang dilakukan oleh pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah tersebut adalah berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi didalam partai dengan cara menyelesaikan dari dalam. Mereka tidak menginginkan terjadinya huru-hara yang seharusnya hanya jadi konsumsi internal, tetapi justru menjadi tersebar kemana-mana dan menjadi konsumsi publik. Para pengurus di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah menganggap bahwa partai itu sama seperti keluarga, artinya mereka tidak ingin segala hal yang terjadi menjadi konsumsi publik. Para pengurus akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi didalam partai termasuk masalah-masalah yang muncul dari tindakan-tindakan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus atau anggotanya.

Untuk penerapan sanksi bagi kader atau pengurus yang melakukan tindak pidana didalam partai, dalam proses pemeriksaan serta penyelesaian masalah terhadap pihak yang melakukan tersebut akan dilakukan sidang. Dalam sidang tersebut, para pengurus seperti ketua, sekretaris, bendahara, direktur eksekutif, perwakilan perpengurus seluruh badan-badan serta dewan-dewan akan dilibatkan. Didalam perkumpulan tersebut, nantinya mereka akan berdiskusi terkait hukuman apa yang dinilai paling tepat untuk diberikan kepada pelaku. Didalam pertemuan tersebut juga mereka akan langsung memberikan hukuman yang telah disepakati bersama kepada pelaku tersebut, tentunya jika hukuman telah ditentukan secara bersama oleh para pengurus tersebut secara otomatis pelaku harus menerima hukuman tersebut tanpa ada kesempatan untuk menolak, berdiskusi, ataupun memberikan saran.

Tentunya akan ada pemanggilan untuk seluruh pihak yang terkait, termasuk pelaku itu sendiri. Untuk hukuman yang telah ditentukan memang bagi pelaku tidak diberikan kesempatan untuk membantah atau dimintai pendapat, akan tetapi jika didalam hukuman tersebut terdapat unsur pembuatan perjanjian bagi pelaku tentunya pelaku akan diikutsertakan guna mengetahui serta menyetujui perjanjian-perjanjian yang nantinya akan disepakati bersama.

“Jadi kita disini sebagai pengurus bukan berarti tidak memiliki ketegasan, acuh, atau tidak peduli terkait perilaku-perilaku para kader atau pengurus, kita sistemnya saling mempercayai kinerja yang dimiliki oleh masing-masing pengurus ataupun kader kita. Akan tetapi, jika ditemukan suatu kasus kita tidak akan segan untuk menindak pelaku dari kasus tersebut. Pokoknya kita disini sebisa mungkin menyelesaikan segala permasalahan itu cukup diselesaikan didalam, kita akan menyelesaikan suatu kasus diluar partai jika hal tersebut memang diperlukan untuk kita lakukan. Tapi alhamdulillahnya selama ini kita tidak memiliki permasalahan terkait keuangan yang dilakukan oleh pengurus ataupun anggota kader, namun kita tidak akan lengah untuk mengelola partai ini apalagi terkait keuangan.” (Kholik Idris, 2022).

Untuk tetap menjaga sinergitas didalam partai dalam mengelola khususnya keuangan, mereka akan terus memantau kinerja para pengurus terkait keaktifan para pengurus dalam mengemban tanggung jawab yang diterimanya. Jika memang terdapat pengurus yang tidak aktif, ketua akan me-non aktifkan pengurus tersebut dan menggantinya dengan pengurus yang baru. Dengan begitu, permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam partai akan dapat diselesaikan dari dalam dengan sinergitas yang terus dibangun oleh para pengurus partai.

BAB V

ANALISA TERKAIT KENDALA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DI DPD PARTAI DEMOKRAT JAWA TENGAH

Pada bab ini akan membahas mengenai kendala-kendala yang dialami oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam mengelola keuangan partai dan bagaimana sikap dari pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam melakukan penyelesaian terkait atau kendala yang dialami tersebut. Data lapangan untuk menunjang penulisan ini diambil melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang kompeten pada pembahasan ini. Pada bab ini data dipandu oleh teori-teori yang relevan dan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan sehingga menjadi suatu penulisan yang sistematis dan komprehensif.

A. Kendala Dalam Mengelola Keuangan Partai

Didalam DPD Partai Demokrat Jawa Tengah memiliki banyak pengurus yang terdiri dari beberapa bidang, dalam mengelola keuangan partai melibatkan pengurus yang menjabat sebagai ketua, bendahara, Direktur Eksekutif (DE), dan wakil Direktur Eksekutif (Wakil DE). Akan tetapi, bendahara menjadi peran utama dalam mengelola keuangan yang berkolaborasi dengan wakil DE bidang keuangan. Dalam mengelola keuangan organisasi seperti partai politik, dengan jumlah uang yang besar dan didapatkan dari berbagai sumber tersebut tentu dalam pengelolaan keuangannya harus dilaksanakan sebaik mungkin. Namun dalam setiap kepengurusan organisasi pasti terdapat beberapa kendala, karena dalam kepengurusannya melibatkan berbagai sumber serta berbagai kepentingan didalamnya. Didalam penelitian ini akan membahas kendala-kendala yang dimiliki DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam mengelola keuangan partai.

DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam mengelola keuangan tidak terlepas dari beberapa kendala, hal tersebut terjadi akibat kegagalan kinerja para pengurus partai ataupun terjadi karena terdapat kondisi yang tercipta diluar kehendak pengurus. Perolehan suara Partai Demokrat di Jawa Tengah serta perolehan kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Demokrat yang berjumlah 5 kursi pada pemilu 2019 menjadi bagian dari faktor terjadinya kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan partai. Karena berdasarkan Pergub Jawa Tengah No 40 Tahun 2019 Tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik di Jawa Tengah pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa besaran nilai bantuan keuangan partai politik yaitu sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Sedangkan partai demokrat memperoleh 954.351 suara dari 13 Dapil di Jawa Tengah (KPU Provinsi Jawa Tengah, 2019), sehingga DPD Partai Demokrat hanya memperoleh bantuan dana politik sebesar Rp. 1.145.101.200,- per tahun dari APBD Jawa Tengah. Hal ini terbilang sedikit mengingat partai demokrat merupakan partai besar, bahkan pernah merasakan kejayaan dalam dua periode.

Keberadaan anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang hanya berjumlah 5 anggota juga menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan partai, karena sedikitnya anggota fraksi membuat sumber keuangan dari iuran anggota fraksi menjadi lebih sedikit. Mengingat sumber keuangan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah hanya dari bantuan partai politik dan iuran anggota fraksi menyebabkan keberadaan jumlah anggota fraksi partai demokrat saat ini menjadi sebuah kendala dalam pengelolaan keuangan partai. Karena dengan semakin banyaknya kursi DPRD yang berhasil diraih oleh suatu partai politik akan semakin banyak juga keuangan yang didapatkan dari hasil yang bersumber iuran anggota fraksi partai politik tersebut. Jika dibandingkan dengan partai besar lainnya, lima anggota fraksi partai demokrat di DPRD Provinsi Jawa Tengah termasuk sedikit jumlahnya.

“Berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat dalam rapat koordinasi pengurus DPD Partai Demokrat, para anggota fraksi dari partai demokrat Jawa Tengah harus memberikan iuran yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- per anggota. Untuk penyetoran biasanya diserahkan kepada Winantu karena dia sebagai staff bagian keuangan disini, artinya dia yang mengelola terkait hal itu.” (Ali Mas’adi, 2022).

Pendapatan keuangan partai merupakan salah satu kendala DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam mengelola keuangan partai, karena jika ditotal sumber keuangan partai dari bantuan keuangan politik dan iuran anggota fraksi berjumlah Rp. 1.625.101.200,- per tahunnya. Hal tersebut membuat pengurus partai khususnya pengurus keuangan perlu cermat dalam pengelolaan keuangan partai, mengingat DPD Partai

Demokrat Jawa Tengah memiliki banyak agenda kegiatan baik kegiatan internal maupun kegiatan yang berkaitan dengan eksternal partai.

“Kita merasa dengan keuangan yang diperoleh saat ini berharap bisa mendapatkan lebih, apalagi semenjak peraturan pemerintah yang lebih membatasi penggunaan keuangan yang mengatur bahwa uang bantuan politik itu 60% dari 100% penggunaannya wajib untuk kepentingan pendidikan politik. Karena uang bantuan politik dapat dikatakan sebagai salah satu sumber yang sangat penting ya, kita disini kan keuangan hanya didapat dari dua sumber saja sedangkan kita juga tidak bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan setiap tahunnya karena menurut kita semua itu perlu untuk dilaksanakan.” (Sih Winantu, 2022).

Keuangan yang dirasa kurang saat ini menjadi kendala bagi pengurus dalam mengelola penggunaan keuangan partai, mengingat kebutuhan partai tidak sedikit. Selain untuk memenuhi agenda kegiatan pendidikan politik, juga terdapat kebutuhan operasional sekretariat yang perlu dipenuhi termasuk mengurus DPC Partai Demokrat yang tersebar diseluruh kota yang berada di Jawa Tengah karena kepengurusan DPC termasuk pertanggungjawaban bagi DPD Partai. Khususnya ketika mendekati pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) biasanya terdapat masalah seperti penentuan calon pengurus, administrasi calon pengurus, dan lain-lain yang memerlukan pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mendatangi DPC yang bermasalah tersebut untuk membantu penyelesaian masalah. Hal tersebut tentunya memerlukan dana untuk kebutuhan operasional yang dikeluarkan dari keuangan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

Dengan kurangnya pendapatan partai yang dirasakan, para pengurus merasa hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam mengelola keuangan partai. Karena dengan agenda kegiatan yang dimiliki oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, keuangan yang dimiliki saat ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan partai itu sendiri. Maka dari itu, pengurus dituntut untuk mampu mengelola keuangan yang dimiliki tersebut agar segala kegiatan dan kebutuhan yang dimiliki dapat tetap terpenuhi ditengah kondisi keuangan yang menjadi kendala didalamnya.

Dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 pasal 96 ayat 1 diatur bahwa keuangan partai dapat diperoleh dari iuran anggota, iuran anggota fraksi pada semua tingkatan, sumbangan yang sah secara hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pada realitanya, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah hanya memiliki dua sumber keuangan yaitu iuran anggota fraksi dan bantuan dana politik. Artinya, terdapat satu hal yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dalam memperoleh sumber keuangan yaitu merealisasikan iuran anggota partai. Hal tersebut memiliki relevansi dengan pendapatan yang dimiliki saat ini masih dirasa kurang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan partai, sehingga iuran anggota partai seharusnya dapat membantu pendapatan keuangan di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah jika diterapkan dan menjadi sumber pendapatan partai sesuai yang tertera dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.

“Untuk masalah iuran anggota, kita disini memiliki ribuan anggota diberbagai kota di Jawa Tengah ini yang secara aktif ditandai dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA), sehingga dirasa sulit jika harus diadakan kewajiban iuran untuk seluruh anggota. Jika pengurus partai tetap melaksanakan kewajiban iuran untuk seluruh anggota, nantinya dikhawatirkan akan timbul kecemburuan sosial bagi anggota yang melaksanakan peraturan tersebut membayar iuran secara rutin kepada anggota-anggota yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut. Sehingga nantinya, akan memudahkan keinginan anggota yang patuh tersebut untuk membayar iuran atau menimbulkan ketidakharmonisan antara sesama anggota partai dan akhirnya aturan iuran anggota menjadi tidak terlaksana.” (Ali Mas’adi, 2022).

Pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah merasa bahwa untuk merealisasikan kebijakan iuran anggota sulit dan menjadi kendala, karena jumlah anggota partai yang begitu banyak membuat mereka memutuskan untuk tidak membuat kebijakan iuran anggota tersebut. Jika dilihat dari salah satu konsep dari tiga konsep VFM Audit, yaitu konsep ekonomi dengan pengertian bahwa biaya input yang diterapkan didalam operasional organisasi dipastikan mampu diraih dengan sumber daya yang tersedia

(Mardiasmo, 2018). AD/ART Partai Demokrat yang menegaskan terkait sumber keuangan partai bisa didapat dari iuran anggota merupakan salah satu sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh DPD Partai Demokrat, mengingat rasa ingin memiliki keuangan lebih yang menjadi faktor kendala dalam pengelolaan keuangan partai seharusnya hal itu dapat dijadikan sebagai satu sarana untuk membantu DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mengatasi kendala tersebut. Meskipun mereka menyatakan bahwa pelaksanaan iuran anggota sulit dikarenakan anggota partai yang berjumlah banyak, namun seharusnya perlu ada upaya bagi pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah untuk merealisasikan iuran anggota tersebut.

B. Sikap Pengurus DPD Partai Demokrat Dalam Menyelesaikan Permasalahan Dalam Pengelolaan Keuangan

Perlu sinergitas para pengurus dalam mengelola keuangan partai termasuk mengelola keuangan serta menyelesaikan suatu permasalahan yang dimiliki, dengan begitu sebuah partai akan terlihat kualitasnya dalam berpolitik termasuk memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu partai politik. Pengelolaan dan pengurusan diterapkan pada partai politik dengan tujuan untuk menciptakan daya tarik serta menciptakan apresiasi masyarakat guna merealisasikan juga sebagai upaya dalam suatu hal yang diinginkan bagi masyarakat berdasarkan visi dan misi (Yuli Handayani, 2015:36).

Dalam pembahasan sebelumnya, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan yaitu keuangan yang kurang mencukupi untuk segala kegiatan dan kebutuhan yang dimiliki partai. Kurangnya keuangan tersebut menjadi kendala karena memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan partai yang harus memenuhi segala kebutuhan dan melaksanakan segala kegiatan yang dimiliki, dengan begitu teori VFM Audit sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan dengan kondisi tersebut. Dimana terdapat tiga konsep dalam teori tersebut yaitu ekonomi, efisien, dan efektif.

“Karena keuangan yang kita dapatkan saat ini rasanya kurang cukup jika digunakan secara keseluruhan kebutuhan partai, maka dari itu kita dalam beberapa hal biasanya mengajukan RAB suatu kegiatan kepada pengurus ataupun anggota fraksi kita dengan tujuan agar menghindari banyaknya penggunaan keuangan pokok

kita yang dapat mengakibatkan keuangan pokok itu tidak dapat mencukupi kebutuhan selama satu tahun.” (Kholik Idris, 2022).

Dengan pendapatan partai yang tidak terlalu besar untuk mencukupi kebutuhan partai, para pengurus mencari penyelesaian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membantu memenuhi segala kebutuhan dan kegiatan partai seperti mengajukan RAB dalam suatu kegiatan partai kepada anggota fraksi ataupun kepada pengurus. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi didalam teori VFM Audit, yang dimana ekonomi merupakan biaya *input* yang diterapkan dalam operasional organisasi dipastikan mampu diraih dengan sumber daya yang tersedia (Mardiasmo, 2018). Dengan memanfaatkan sumber daya yang masih tersedia, pengurus menjadikan hal tersebut untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan agar tetap bisa memenuhi segala kebutuhan partai. Sumbangan yang didapat dari anggota fraksi ataupun pengurus diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya yang tersedia yang dimiliki oleh partai, sumbangan tersebut tentunya diluar pendapatan pokok partai yang bersumber dari bantuan dana politik dan iuran anggota fraksi. Dengan begitu, kendala yang dimiliki oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dapat diselesaikan oleh pengurus sehingga segala kebutuhan dan kegiatan partai dapat dipenuhi.

Penyelesaian terhadap kendala pengelolaan keuangan di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah tidak hanya sampai disitu, mereka tetap melakukan upaya yang lain untuk membantu mengatasi kendala tersebut dengan merencanakan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat seperti sarasehan pada masa pemilu yang akan datang. Pendidikan politik bagi anggota tentunya dapat menciptakan kader-kader yang berkualitas dan memiliki peran yang signifikan bagi bangsa dan negara, sedangkan pendidikan politik bagi masyarakat tentunya selain menanamkan jiwa kebangsaan bagi masyarakat juga sebagai sarana partai politik membangun relasi atau kedekatan dengan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan merasa mendapatkan kepedulian dan perhatian dari partai demokrat sehingga kedekatan antara partai demokrat dan masyarakat akan terjalin. Hal tersebut dapat membuat partai demokrat mampu meraih suara yang lebih banyak untuk pemilu kedepannya.

Menggerakkan beberapa organisasi sayap yang dimiliki partai demokrat di Jawa Tengah agar kembali aktif dan produktif juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh para pengurus dengan tujuan menaikkan popularitasnya kembali dikalangan masyarakat, sehingga membantu partai demokrat kembali dilihat ataupun diketahui oleh masyarakat sebagai partai yang eksis. Seperti Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) di Jawa Tengah yang kembali diaktifkan dengan adanya kaderisasi serta pembentukan struktur organisasi setelah sudah sekian lama organisasi sayap tersebut tidak memperlihatkan keaktifannya dalam berorganisasi.

Dengan upaya yang dilakukan seperti itu, tentunya hal tersebut bertujuan untuk menaikkan popularitas partai demokrat di Provinsi Jawa Tengah kembali dan membuka peluang bagi partai demokrat mampu mendapatkan suara yang lebih banyak pada pemilu 2024. Dengan adanya Pergub Jawa Tengah No. 40 Tahun 2019 yang mengatur bahwa besaran jumlah bantuan dana politik bagi partai politik yaitu Rp. 1.200,- per suara sah, maka jika partai demokrat berhasil meraih suara yang lebih banyak lagi pada pemilu 2024 secara otomatis keuangan mereka akan meningkat karena mendapatkan bantuan dana politik yang lebih banyak serta mendapatkan kursi legislatif yang lebih banyak juga. Dengan begitu, tentunya mereka tidak perlu mengandalkan secara terus menerus solusi mengenai pengajuan RAB suatu kegiatan guna mendapatkan dana sumbangan anggota fraksi dan para pengurus diluar sumber pokok pendapatan keuangan partai.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab penutup, peneliti menarik kesimpulan dari penjelasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab yang sebelumnya. Kemudian, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang bersangkutan pada laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami makna dan inti dari pembahasan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang penulis lakukan tentang pengelolaan keuangan partai politik yang dimiliki oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dan kendala-kendala yang dimiliki DPD Partai Demokrat Jawa Tengah beserta sikapnya dalam menghadapi kendala tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah berdasarkan tiga konsep yang terdapat dalam teori VFM Audit, masih terdapat beberapa konsep (ekonomi, efisiensi, efektif) yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah. Karena dalam pengelolaan pedapatan partai, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah masih belum maksimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. DPD Partai Demokrat Jawa Tengah tidak menjadikan sumber daya anggota partai sebagai sumber keuangan partai, yang dimana hal tersebut seharusnya dapat dilakukan untuk menambahkan keuangan partai sekaligus mengatasi kendala yang dimiliki yaitu kurangnya keuangan partai untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan partai. Selain itu, pengelolaan keuangan partai untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik pada kalangan masyarakat yang minim menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan keuangan di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah kurang efektif. Karena dari seluruh kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan, berdasarkan laporan keuangan partai tahun 2021 hanya terdapat satu kali pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat yaitu sarasehan. Dalam mengelola keuangan partai, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah hanya fokus terhadap kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai.

2. Sikap DPD Partai Demokrat Jawa Tengah untuk periode saat ini adalah menanamkan kebijaksanaan dalam penggunaan keuangan partai. Artinya, mereka bersikap efisien dalam mengelola keuangan partai. Pengajuan RAB suatu kegiatan kepada pengurus ataupun anggota fraksi juga dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Jawa Tengah sebagai salah satu sikap ekonomis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan dana tambahan sehingga membantu DPD Partai Demokrat Jawa Tengah tetap mampu memenuhi segala agenda kegiatan yang perlu dilaksanakan. Sedangkan sikap yang dilakukan saat ini untuk masa yang akan datang, para pengurus membangun strategi politik dengan tujuan meningkatkan popularitas dan dukungan masyarakat untuk pemilu yang akan datang dengan cara membangun hubungan yang dekat antara partai dan masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan sumber keuangan partai dari APBD Provinsi Jawa Tengah juga iuran anggota fraksi, karena semakin banyak suara yang berhasil diperoleh maka akan semakin banyak juga keuangan yang dimiliki. Sama halnya dengan iuran anggota fraksi, semakin banyak keberhasilan partai mendapatkan kursi legislatif maka akan semakin banyak juga sumber keuangan yang dimiliki oleh partai tersebut. Dengan penerapan teori VFM Audit dalam pengelolaan keuangan partai, membuat DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mampu mengatasi kendala yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan partai.

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai dasar masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan pada hasil laporan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah diharapkan mampu berupaya untuk membangun keharmonisan dan kenyamanan dalam hubungan bagi para anggota kader beserta pengurus agar nantinya iuran anggota partai akan dapat terealisasi sebagai tambahan sumber keuangan yang dimiliki oleh partai. karena dengan keharmonisan dan kedekatan bagi para pengurus beserta anggota nantinya akan menciptakan kekompakan didalamnya, sehingga iuran anggota dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme sistem yang memudahkan untuk merealisasikannya.

2. Bagi pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah perlu menciptakan aturan secara tertulis yang bersifat internal dan diberlakukan untuk seluruh pengurus beserta anggota partai. Agar dapat menjadi suatu bentuk peringatan bagi seluruh pihak untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan dapat dilakukan dan memiliki sanksi yang konkrit untuk seluruh pelanggar berdasarkan segala jenis pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. C. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. 6 No. 4.
- Aisah Putri Budiarti, d. (2021). *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amri, M. R. (2012). *Strategi dan Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asmani, J. M. (2012). *Manajemen dan Organisasi Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Belladona, A. P. (2018). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2.
- Budiardjo, M. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin, N. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Febrianto, N. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Bantuan BOS Reguler Tahun 2020 Sebagai Pengendalian Biaya SDN Tempursari 01 Kedungjajang.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Friedrich, C. J. (1967). *Introduction To Political Theory: Twelve Lectures At Harvard*. New York: Harper & Row.
- Gaol, W. W. (2014). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN Dan/Atau APBD.
- Hakim, A. N. (2020). Analisis Pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Selatan.

- Handayani, Y. (2015). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung).
- Hasibuan, M. S. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Idris, K. (2022). Wawancara Pribadi, 23 Desember 2022.
- Junaidi, V. (2011). *Anomali Keuangan Partai Politik : Pengaturan dan Praktek*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Malia, E. (2021). Penerapan Good Political Governance Sebagai Upaya Transparansi Dana Partai Politik. *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, Vol. 11 No. 1.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Mas'adi, A. (2022). Wawancara Pribadi, 16 Desember 2022.
- Mas'adi, A. (2023). Wawancara Pribadi, 19 Januari 2023.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, M. (2015). *Budgeting: Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nahuddin, Y. E. (2015). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 276-292.
- Ni Wayan Supriyanti, N. P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Partai Demokrasi Perjuangan Gianyar dan Klukung Provinsi Bali. *Jurnal Nlara*, 250-255.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 177-181.

- Partai Demokrat. (2020). *struktur-organisasi*. Retrieved Desember 24, 2022, from demokrat.or.id: <https://www.demokrat.or.id/struktur-organisasi/>
- Partai Demokrat. (2020). *pengurus-dpp*. Retrieved Desember 24, 2022, from demokrat.or.id: <https://www.demokrat.or.id/pengurus-dpp/>
- Partai Demokrat. (2020). *Sejarah*. Retrieved Desember 24, 2022, from demokrat.or.id: <https://www.demokrat.or.id/sejarah/>
- Pinilih, S. A. (2017). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum*, 69-81.
- Prasetyo, K. F. (2011). Audit Keuangan Partai Politik Ditinjau Dari Hukum Keuangan Negara.
- Qeis, K. A. (2020). Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APB di Indonesia.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. *Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1-28.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya.
- Rinto, S. (2022). Wawancara Pribadi, 16 Desember 2022.
- Solihin, I. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Soltau, R. H. (1961). *An Introduction And Democracy*. London: Longmans.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syakila, R. N. (2020). Implementasi Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 97-110.
- Winantu, S. (2022). Wawancara Pribadi, 16 Desember 2022.
- Winantu, S. (2023). Wawancara Pribadi, 19 Januari 2023.

Yoyoh, E. (2015). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

LAMPIRAN

Gambar 7 Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

06 Januari 2023

Nomor : 80/Un.10.6/K/KM.05.01/01/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Analisis Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus: DPD Partai Demokrat Jawa Tengah)"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Rezka Nur Satyo
NIM : 1906016062
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Bekasi, 5 September 2001
CP/e-mail : 081218535500/nurrezkasatyo@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Toha Yusuf Prayitno
Pekerjaan : Montir
Alamat : Perumahan Polymer Blok E No 13 RT02/RW021 Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, Jawa Barat

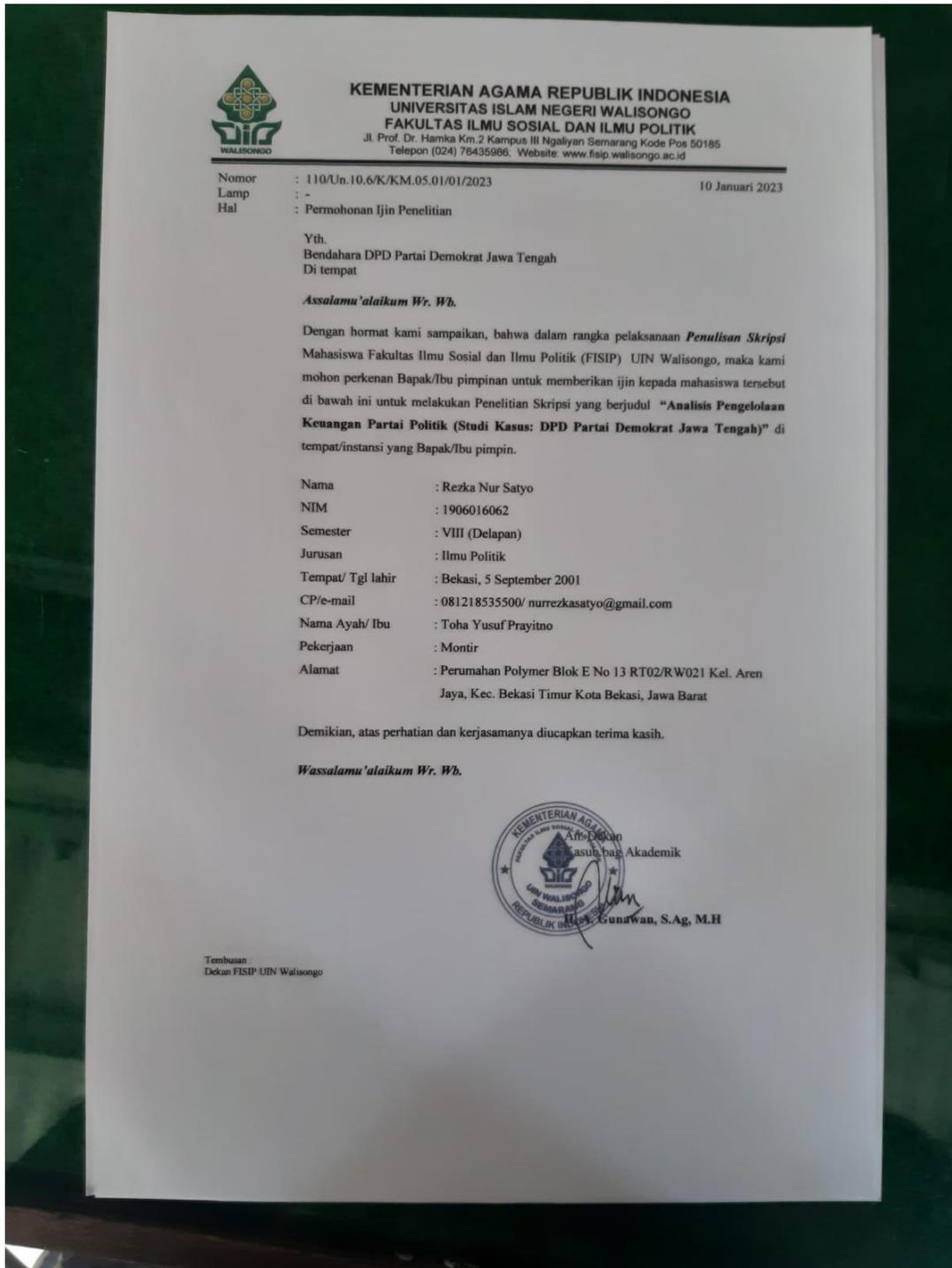
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Kasubag Akademik
A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan
Dekan FISIP UIN Walisongo

Gambar 8 Surat Izin Penelitian



Gambar 9 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 220/Un.10.6/K/KM.05.01/01/2023 19 Januari 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Analisis Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus: DPD Partai Demokrat Jawa Tengah)**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Rezka Nur Satyo
NIM : 1906016062
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Bekasi, 5 September 2001
CP/e-mail : 081218535500/ nurrezkasatyo@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Toha Yusuf Prayitno
Pekerjaan : Montir
Alamat : Perumahan Polymer Blok E No 13 RT02/RW021 Kel. Aren
Jaya, Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, Jawa Barat

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Gambar 10 Surat Permohonan Informasi Kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



BADAN PENGAWA PEMILIHAN UMUM
JL.Papandayan Selatan No.1
024-76423074 / ppidbawaslujateng@gmail.com

TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik:

Nama : Reza Nur Satyo

Alamat : Perum Polymer blok E no 13 Kota Bekasi Jawa Barat

Tanggal penyerahan formulir permohonan : 2023-01-18

Nomor Registrasi Permohonan : 002/HM.00.01/JT/01/2023

Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik:

Nama : Dede

Jabatan : Administrator PPIID

Kota Semarang Jawa Tengah, 20/01/2023



(Kode merupakan bukti sah dari Sistem PPIID Bawaslu
selama dapat terbaca dan terscan dengan benar)

Gambar 12 Dokumentasi Wawancara Bersama Bendahara



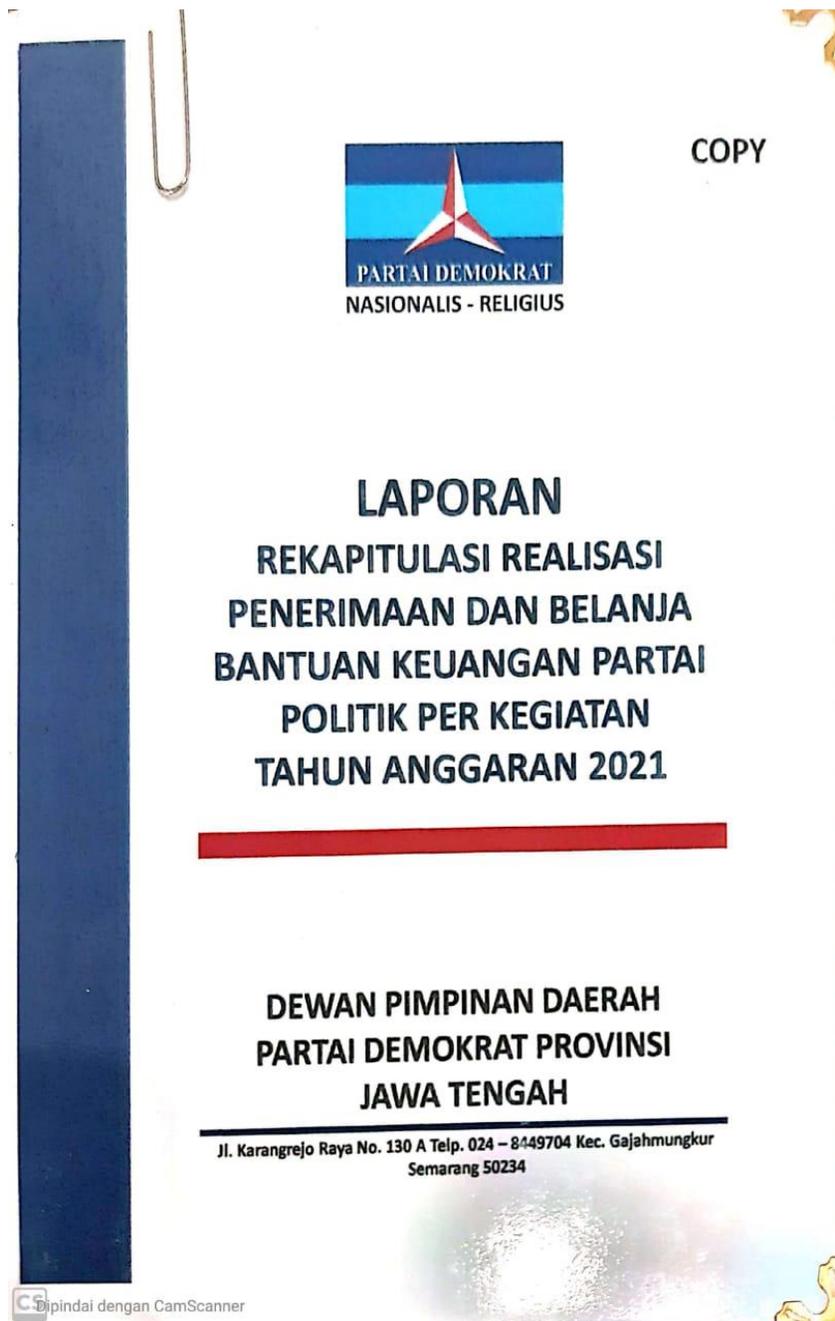
Gambar 13 Dokumentasi Wawancara Dengan Wakil Direktur Eksekutif Bagian Keuangan



Gambar 14 Dokumentasi Wawancara Dengan Staff Kantor



Gambar 15 Dokumentasi Laporan Keuangan Dana Bantuan Politik Tahun 2021





DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRAT
PROVINSI JAWA TENGAH

KAS UMUM
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT - PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

TAHUN BULAN	No Bukti	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
01-Jan-21	Jan-10	Listrik - 523040506759			
01-Jan-21	Jan-11	Telepon 024 08449704		2.518.180	(2.518.180)
01-Jan-21	Jan-12	PDAM - 05400064		1.620.485	(4.138.665)
01-Jan-21	Jan-18	Bio Solar 19,417 L - Innova		975.800	(5.114.465)
01-Jan-21	Jan-19	Amidis 19 L - Galon		100.000	(5.214.465)
01-Jan-21	Jan-24	Membayar kontrak kantor ke 1 (Satu)		93.000	(5.307.465)
01-Jan-21	Jan-26	Bio Solar 19,417 L - Innova		100.000.000	(105.307.465)
01-Jan-21	Jan-35	Foto Kopi 981 Lb		100.000	(105.407.465)
01-Jan-21	Jan-37	Bio Solar 19,417 L - Innova		196.200	(105.603.665)
01-Jan-21	Jan-43	Kirim Surat ke DPC Se Jateng		100.000	(105.703.665)
01-Jan-21	Jan-52	4 Jilid kilat hard cover, Foto Kopi 501 Lb		314.500	(106.018.165)
01-Jan-21	Jan-54	Foto kopi 381 lb		200.200	(106.218.365)
01-Jan-21	Jan-55	Air Amidis 19 LT, & Amidis 240 ML		76.200	(106.294.565)
01-Jan-21	Jan-58	Foto kopi 419 Lb - LPJ		161.500	(106.456.065)
01-Jan-21	Jan-60	Foto kopi biasa		83.800	(106.539.865)
01-Feb-21	GJJAN-002	Gaji bulan Januari - Sih Winantu		6.400	(106.546.265)
01-Feb-21	GJJAN-005	Gaji bulan Januari - Fauziah Fitriyani		3.000.000	(109.546.265)
01-Feb-21	Feb-14	Langganan koran bulan Januari		3.000.000	(112.546.265)
01-Feb-21	Feb-17	Listrik - 523040506759		330.000	(112.876.265)
01-Feb-21	Feb-18	PDAM - 05400064		1.935.373	(114.811.638)
01-Feb-21	Feb-19	Telepon 024 08449704		1.374.800	(116.186.438)
01-Feb-21	Feb-22	Kertas Sidu A4 70		1.494.135	(117.680.573)
01-Feb-21	Feb-29	Map business & Odner Kiky		182.500	(117.863.073)
01-Feb-21	Feb-38	Air mineral galon 3, botol 6 Dus		102.000	(117.965.073)
01-Mar-21	GJFEB-002	Gaji bulan Februari Sih Winantu		249.300	(118.214.373)
01-Mar-21	GJFEB-005	Gaji bulan Februari Fauziah Fitriyani		3.000.000	(121.214.373)
01-Mar-21	Mar-09	Langganan koran bulan Februari		3.000.000	(124.214.373)
01-Mar-21	Mar-16	Tinta Epson, Hitam 2, Biru 1		330.000	(124.544.373)
01-Mar-21	Mar-19	Rakorda di Grand Candi Hotel 5-7 Maret		225.000	(124.769.373)
01-Mar-21	Mar-39	Listrik - 523040506759		100.394.635	(225.164.008)
01-Mar-21	Mar-41	Telepon 024 08449704		1.905.252	(227.069.260)
01-Mar-21	Mar-40	PDAM - 05400064		1.477.802	(228.547.062)
01-Apr-21	Apr-05	Langganan koran Bulan Maret		1.210.850	(229.757.912)
01-Apr-21	GJMAR-002	Gaji bulan Maret Sih Winantu		330.000	(230.087.912)
01-Apr-21	GJMAR-005	Gaji bulan Maret Fauziah Fitriyani		3.000.000	(233.087.912)
01-Apr-21	GJMAR-005	Gaji bulan Maret Fauziah Fitriyani		3.000.000	(236.087.912)

No Bukti	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
01-Apr-21	Foto Kopi Lap. Bulanan Th 2020 dan Jilid		39.200	(236.127.112)
01-Apr-21	Service Printer pak Ali		180.000	(236.307.112)
01-Apr-21	PDAM - 05400064		92.800	(236.399.912)
01-Apr-21	Telepon 024 08449704		1.494.925	(237.894.837)
01-Apr-21	Listrik - 523040506759		2.407.901	(240.302.738)
01-Apr-21	Cross Couple @ 205.000 & Jasa perbaikan		815.000	(241.117.738)
01-Apr-21	Membayar kontrak kantor ke II (Dua)		75.000.000	(316.117.738)
01-Apr-21	Pembuangan		215.000	(316.332.738)
01-Apr-21	Langganan koran DPD Bulan April		330.000	(316.662.738)
01-May-21	Me-13 GJAPR-002 Gaji bulan April Sih Winantu		3.000.000	(319.662.738)
01-May-21	GJAPR-005 Gaji bulan April Fauziah Fitriyani		3.000.000	(322.662.738)
01-May-21	Me-17 Listrik - 523040506759		1.947.408	(324.610.146)
01-May-21	Me-18 PDAM - 05400064		159.800	(324.769.946)
01-May-21	Me-19 Telepon 024 08449704		1.609.240	(326.379.186)
01-May-21	Me-23 ATK - Lakban, Kertas, dan Spidol		375.500	(326.754.686)
01-May-21	Me-28 Bolpoin, Label, Pen stand jala		140.500	(326.895.186)
01-May-21	Me-61 Amidis 330 ml		169.000	(327.064.186)
01-May-21	Me-68 Sarasehan		8.536.000	(335.600.186)
01-Jun-21	Jun-05 Kabel VGA		250.000	(335.850.186)
01-Jun-21	GJME-002 Gaji bulan Mei Sih Winantu		3.000.000	(338.850.186)
01-Jun-21	GJME-005 Gaji bulan Mei Fauziah Fitriyani		3.000.000	(341.850.186)
01-Jun-21	Jun-15 Langganan koran Bulan Mei		330.000	(342.180.186)
01-Jun-21	Jun-13 Air Amidis 5 Dus, 5 Galon, 5 Dus Botol		361.500	(342.541.686)
01-Jun-21	BPK-27.1 Penerimaan dari Pemerintah Provinsi Jateng	1.145.101.200		802.559.514
01-Jun-21	Jun-32 Listrik - 523040506759		2.734.798	799.824.716
01-Jun-21	Jun-33 PDAM - 05400064		261.800	799.562.916
01-Jun-21	Jun-34 Telepon 024 08449704		1.519.029	798.043.887
01-Jun-21	Jun-43.1 Musda ke 3 DPD Partai Demokrat Jateng-tgl 15-17 juni 2021		306.236.038	491.807.849
02-Jul-21	GJJUN-002 Gaji bulan Juni Sih Winantu		3.000.000	488.807.849
02-Jul-21	GJJUN-005 Gaji bulan Juni Fauziah Fitriyani		3.000.000	485.807.849
02-Jul-21	Jul-01 19 Lt Air Amidis		77.500	485.730.349
05-Jul-21	Jul-03 Telepon 024 08449704		1.537.187	484.193.162
05-Jul-21	Jul-04 Listrik - 523040506759		2.796.439	481.396.723
05-Jul-21	Jul-05 PDAM - 05400064		198.800	481.197.923
05-Jul-21	Langganan koran Bulan Juni		330.000	480.867.923
05-Jul-21	Jul-14 Membayar kontrak kantor ke III (Tiga)		75.000.000	405.867.923
05-Jul-21	Jul-16 Foto kopi Daftar laporan bulan Juni & Musda		30.800	405.837.123
05-Jul-21	Jul-24 Tinta Epson L805 Seri 673, Hitam, Merah - LM, Merah, Kuning		375.000	405.462.123
03-Aug-21	Aug-13 Wiper 16" & 24"		85.000	405.377.123
04-Aug-21	GJJUL-002 Gaji bulan Juli Sih Winantu		3.000.000	402.377.123
04-Aug-21	GJJUL-005 Gaji bulan Juli Fauziah Fitriyani		3.000.000	399.377.123
04-Aug-21	Aug-19 Langganan koran Bulan Juli		330.000	399.047.123
05-Aug-21	Aug-22 Listrik - 523040506759		1.895.582	397.151.541
05-Aug-21	Aug-23 Telepon 024 08449704		1.636.636	395.514.905
05-Aug-21	Aug-24 PDAM - 05400064		184.800	395.330.105
10-Aug-21	Aug-25 Panel OB 18 W @ 85.000		510.000	394.820.105
12-Aug-21	Aug-38 Kirim Baju Seragam ke Brebes		50.500	394.769.605
02-Sep-21	GJAGT-002 Gaji bulan Agustus Sih Winantu		3.000.000	391.769.605

TAHUN	No Bukti	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
02-Sep-21	GJAGT-005	Gaji bulan Agustus Fauziah Fitriyani		3.000.000	388.700.604
03-Sep-21	Sep-11	Langganan Koran Bulan Agustus		330.000	388.439.604
03-Sep-21	Sep-25	Kabel VGA - 10 M- Zoom		300.000	388.139.604
08-Sep-21	Sep-28	Listrik - 523040506759		3.195.542	384.944.063
08-Sep-21	Sep-29	Telepon 024 08449704		1.621.926	383.322.137
08-Sep-21	Sep-30	PDAM - 05400064		240.800	383.081.337
08-Sep-21	Sep-30	Air Mineral Amidis Galon, Botol, Gelas		361.500	382.719.837
08-Sep-21	Sep-36	Muscab Ke 3		317.698.095	65.021.742
09-Oct-21	Okt-04	Langganan koran Bulan September		330.000	64.691.742
09-Oct-21	Okt-06	Gaji bulan September Sih Winantu		3.000.000	61.691.742
09-Oct-21	GJSEP-002	Gaji bulan September Fauziah Fitriyani		3.000.000	58.691.742
09-Oct-21	GJSEP-005	Foto Kopi		18.865	58.672.877
09-Oct-21	Okt-16	Membayar kontrak kantor ke IV (Empat)		25.000.000	33.672.877
11-Oct-21	Okt-19	Listrik - 523040506759		3.092.390	30.580.487
12-Oct-21	Okt-23	PDAM - 05400064		226.800	30.353.687
12-Oct-21	Okt-24	Telepon 024 08449704		1.540.830	28.812.857
12-Oct-21	Okt-25	Amidis 19L, 240L		208.000	28.604.857
21-Oct-21	Okt-32	Langganan Koran Bulan Oktober		330.000	28.274.857
03-Nov-21	Nov-06	Gaji bulan Oktober Sih Winantu		3.000.000	25.274.857
04-Nov-21	GJOKT-002	Gaji bulan Oktober Fauziah Fitriyani		3.000.000	22.274.857
04-Nov-21	GJOKT-005	Service AC- Ruang P. Ali, Bu Win, Kantor Tengah, IT, Portable		300.000	21.974.857
06-Nov-21	Nov-09	Kertas Kwarto 70 Gr		38.500	21.936.357
08-Nov-21	Nov-18	Listrik - 523040506759		2.689.849	19.246.508
11-Nov-21	Nov-29	PDAM - 05400064		401.800	18.844.708
11-Nov-21	Nov-30	Telepon - 024 08449704		1.511.469	17.333.239
11-Nov-21	Nov-31	Setting VGA+SSD+System-IT		100.000	17.233.239
25-Nov-21	Nov-68	Langganan koran Bulan Nopember		330.000	16.903.239
03-Dec-21	Des-08	Gaji bulan November Sih Winantu		3.000.000	13.903.239
06-Dec-21	GJNOP-002	Gaji bulan November Fauziah Fitriyani		3.000.000	10.903.239
06-Dec-21	GJNOP-005	Listrik - 523040506759		2.712.448	8.190.791
06-Dec-21	Des-14	Telepon - 024 08449704		1.507.991	6.682.800
06-Dec-21	Des-15	PDAM - 05400064		352.800	6.330.000
06-Dec-21	Des-16	Gaji bulan Desember - Sih Winantu		3.000.000	3.330.000
31-Dec-21	GJDES-002	Gaji bulan Desember - Fauziah Fitriyani		3.000.000	330.000
31-Dec-21	GJDES-005	Langganan koran Bulan Desember		330.000	-
31-Dec-21	Des- 20				
TOTAL			1.145.101.200	1.145.101.200	

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua
RINTO SUBEKTI SE, MM

Bendahara
KHOLIK IDRIS, SE, SH, M.SI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rezka Nur Satyo
TTL : Bekasi, 5 September 2001
Alamat : Perumahan Polymer Blok E No. 18 RT02/RW021 Kel. Aren Jaya Kota Bekasi
NIM : 1906016062
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama : Islam
Email : nurrezkasatyo@gmail.com
No. HP : 081218535500

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Aren Jaya 15 (2007-2013)
SMPN 32 Kota Bekasi (2013-2016)
SMAN 2 Tambun Selatan (2016-2019)